



**SIKAP AMERIKA SERIKAT TERHADAP RESOLUSI DEWAN
KEAMANAN PBB NOMOR 2334 ERA BARACK OBAMA**

*(The Manner of United States on United Nations Resolutions Number in 2334
Barack Obama Era)*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana

Oleh

NYIRATIH HARUMING AYU HAPSARI

NIM 130910101015

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya, terima kasih telah memberikan pengorbanan yang luar biasa selama ini.
2. Kakek saya tercinta Alm. Tirta Wijoyo, terima kasih telah merawat saya dengan penuh kasih sayang.
3. Teman-teman seperjuanganku, Koko, Dinar, Riya, Linda, Kamila, Resi, Mas Dana, Mas Yery, terima kasih telah banyak membantu penulis serta suntikan semangat dan motivasi guna terselesaikannya skripsi ini.
4. Rekan-rekan di HIMAHl serta keluarga besar FKMHI, terimakasih atas pengalaman dan kesempatan untuk bertukar ide gagasan sehingga memotivasi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir.



MOTTO

“ Life is Like Riding a Bicycle, to Keep Your Balance, You Must Keep Moving” –Albert Einstein



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nyiratih Haruming Ayu Hapsari

NIM : 120910101015

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Sikap Amerika Serikat terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2334 Era Barack Obama” adalah benar-benar hasil karya sendiri kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar.

Jember, 30 April 2018

Yang Menyatakan,

Nyiratih Haruming A

130910101015

SKRIPSI

**SIKAP AMERIKA SERIKAT TERHADAP RESOLUSI DEWAN
KEAMANAN PBB NOMOR 2334 ERA BARACK OBAMA**

Oleh:

Nyiratih Haruming Ayu Hapsari

130910101015

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Agus Trihartono, S.Sos.,M.A,Ph.D

Dosen Pembimbing Anggota : Fuat Albayumi ,SIP.M.A.

RINGKASAN

Sikap Amerika Serikat terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2334 Era Barack Obama; Nyiratih Haruming Ayu Hapsari, 130910101015; 85 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Keputusan Amerika Serikat terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2334 pada tanggal 23 Desember 2016 mengejutkan dunia internasional. Pasalnya, selama ini Amerika Serikat selalu menentang atau memveto resolusi yang akan menyudutkan pihak Israel. Pada tanggal 11 November 2011, Palestina gagal mendapatkan pangakuan dari PBB setelah veto dari Amerika Serikat Era kepemimpinan Presiden Barack Obama. Namun demikian, pada tahun akhir 2016 lalu, Amerika Serikat abstain terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2334.

Keputusan Amerika Serikat di akhir kepemimpinan Presiden Barack Obama mengambil langkah berbeda, yaitu abstain dengan tidak memveto resolusi nomor 2334 yang isinya permukiman Yahudi di Palestina harus dihentikan karena melanggar hukum internasional. Sikap Amerika Serikat untuk tidak memveto resolusi 2334 ini menyebabkan lolosnya resolusi tersebut sehingga mengakibatkan Israel harus menghentikan aktivitas kependudukan permukiman Yahudi di Palestina.

Sikap Amerika Serikat yang tidak menjatuhkan veto terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2334 dinilai langkah baru terkait konflik Israel dan Palestina. Suara abstain yang dikeluarkan Amerika Serikat dalam sidang PBB merupakan sejarah baru bagi AS terutama Era Barack Obama. Namun demikian, Amerika Serikat dalam mengambil sikap abstain terhadap resolusi 2334 mengalami penolakan di level domestik, yaitu Kongres. Berbanding terbalik antara level domestik dan internasional saat Amerika Serikat mengambil sikap abstain terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2334. Oleh karena itu, tujuan penulis mengambil judul tersebut karena ingin mengetahui alasan Amerika Serikat abstain terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2334.

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dalam skripsi ini, dan dalam mengumpulkan data menggunakan studi literatur. Landasan konseptual yang digunakan dalam penulis di sini adalah konsep Two Level game dan Kebijakan Luar Negeri.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sikap Amerika Serikat dalam menyelesaikan konflik Israel dan Palestina menggunakan strategi di dua level

yaitu di level domestik dan internasional. Di level internasional Amerika Serikat ingin menunjukkan keseriusannya dalam menangani konflik Israel dan Palestina Era Barack Obama dengan cara abstain terhadap resolusi DK PBB nomor 2334. Sedangkan di level domestik, kongres Amerika Serikat menolak keputusan resolusi nomor 2334 untuk menunjukkan komitmen AS dalam menjaga eksistensi Israel. Inti daripada sikap Amerika Serikat abstain terhadap resolusi 2334, ialah untuk memperbaiki citra AS Serikat di mata internasional khususnya dunia muslim pada era Barack Obama.



PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sikap Amerika Serikat terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2334 Era Barack Obama”, Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada;

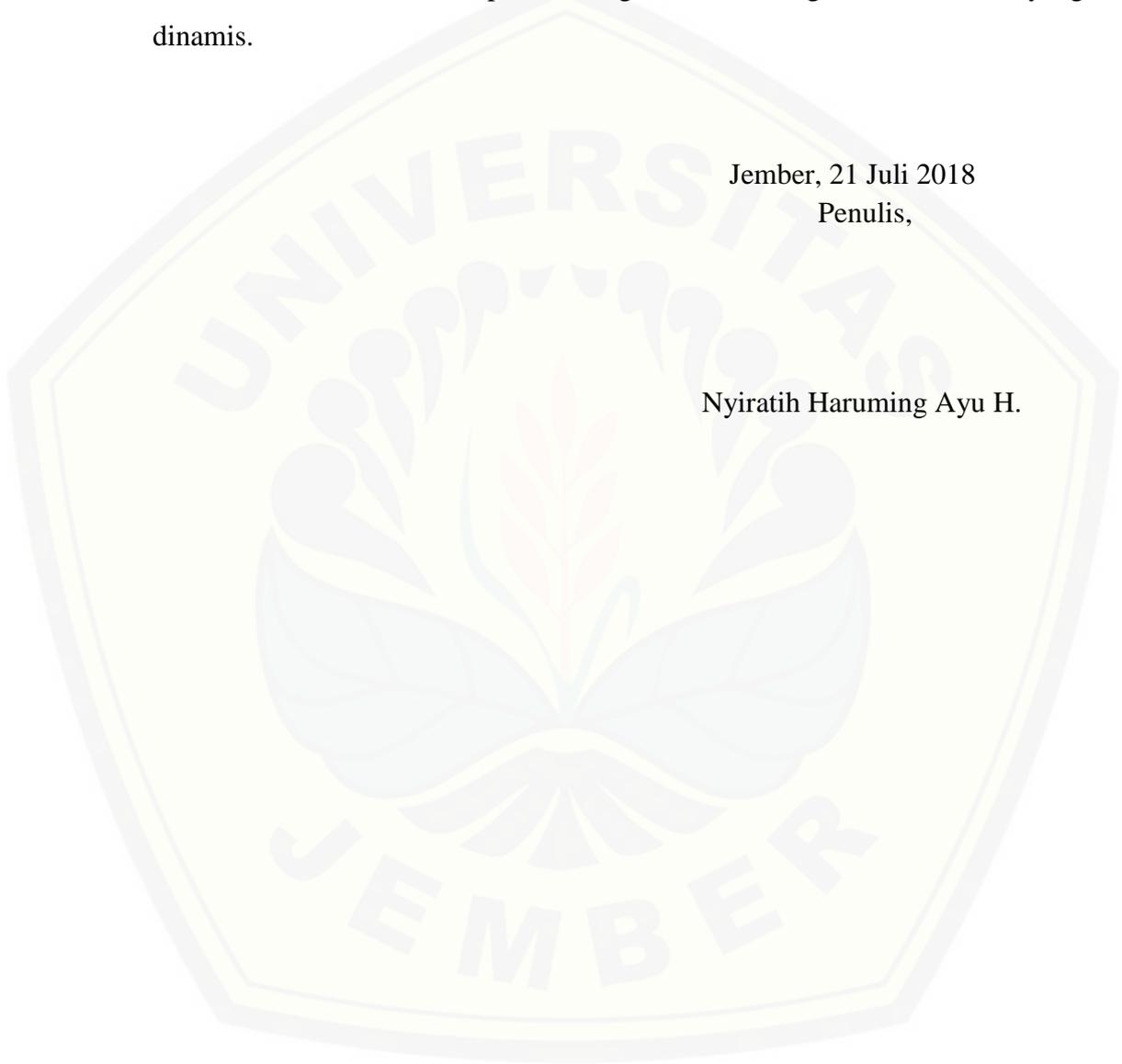
1. Allah Swt, atas limpahan rahmat, petunjuk, serta kasih sayang terhadap hidup penulis;
2. Bapak Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
3. Bapak Agus Trihartono, S.Sos, M.A, Ph.D selaku Dosen Pembimbing utama dan Bapak Fuat Albayumi ,SIP.M.A, selaku Dosen pembimbing Anggota, terima kasih atas bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Drs. Muhammad Nur Hasan, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama di bangku perkuliahan sebagai mahasiswa;
5. Bapak dan Ibu dosen jurusan Hubungan Internasional Universitas Jember atas ilmu dan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa;
6. Staf akademik dan administrasi jurusan HI maupun FISIP Unej yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan berbagai macam urusan administrasi akademis selama ini;
7. Kedua orang tua saya, terimakasih atas curahan doa-doa, kasih sayang, cinta serta segala bentuk pengorbanan yang luar biasa;
8. Guru-guru yang pernah membimbing saya, terima kasih atas didikan serta pelajaran hidup hingga saat ini.
9. Rekan-rekan di jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2013, kakak serta adik tingkat yang telah memberikan suntikan semangat, memotivasi dan tak jarang sering menjadi teman diskusi penulis;
10. Rekan-rekan HIMAHU Universitas Jember, terima kasih atas pengalaman, ilmu, sehingga menjadikan pelajaran hidup yang berharga bagi penulis;
11. Keluarga besar FKMHI korwil VI, terima kasih atas pengalaman, pembelajaran organisasi bagi penulis.
12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuannya

Akhir kata, penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis dengan segala kerendahan hati menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat dan memiliki kontribusi dalam perkembangan Ilm Hubungan Internasional yang dinamis.

Jember, 21 Juli 2018

Penulis,

Nyiratih Haruming Ayu H.



DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	i
Halaman Persembahan.....	ii
Halaman Moto	iii
Halaman Pernyataan	iv
Halaman Pembimbingan	v
Halaman Pengesahan.....	
Ringkasan	vi
Prakarta	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	xiii
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	9
1.2.1 Batasan Materi	9
1.2.2 Batasan Waktu	9
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Landasan Konseptual	11
1.5.1 Konsep Two Level Games.....	11
1.5.2 Konsep Kebijakan Luar Negeri	16
1.6 Argumen Utama	18
1.7 Metode Penelitian.....	18
1.7.1 Teknik Pengumpulan Data.....	18
1.7.2 Teknik Analisis Data	19
1.8 Sistematika penulisan	19

BAB 2 HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT DAN ISRAEL ERA PRESIDEN BARACK OBAMA	21
2.1 Gambaran Ringkas Sejarah Hubungan Amerika Serikat dan Israel.....	22
2.2 Peran AIPAC dalam Hubungan Amerika Serikat dan Israel.	25
2.3 Hubungan Amerika Serikat – Israel Era Presiden Barack Obama.....	27
BAB 3 SIKAP AMERIKA SERIKAT TERHADAP RESOLUSI PBB TERKAIT KONFLIK ISRAEL DAN PALESTINA	39
3.1 Sikap Amerika Serikat terhadap Konflik Israel dan Palestina.	39
3.2 Isi Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2334.....	44
BAB 4 ALASAN AMERIKA SERIKAT ABSTAIN TERHADAP RESOLUSI DK PBB NOMOR 2334 TENTANG AKTIVITAS PEMBANGUNAN PERMUKIMAN ISRAEL DI PALESTINA.....	56
4.1 Perbedaan Sikap Amerika Serikat di level domestik dan internasional terkait Resolusi DK PBB nomor 2334.	59
4.1.1 Sikap Amerika Serikat terhadap Resolusi DK PBB nomor 2334 di level domestik.....	59
4.1.2 Sikap Amerika Serikat terhadap Resolusi DK PBB nomor 2334 di level internasional.....	62
4.2 Alasan Amerika Serikat Abstain terhadap Resolusi DK PBB nomor 2334 Era Barack Obama.....	63
BAB 5 KESIMPULAN	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Data Jumlah Pemukim Yahudi di Kawasan Palestina (diluar kawasan Yerusalem Timur) pada tahun 2009 s/d 2017	34
Tabel 2 Sikap Amerika Serikat terhadap Konflik Israel dan Palestina	40
Tabel 3 Resolusi yang dikeluarkan PBB terkait konflik Israel dan Palestina	57
Tabel 4 Peningkatan jumlah permukiman dari tahun 1977 sampai 2016	64



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Merupakan Penggambaran Sederhana Mengenai Permainan 2 tingkat yang terjadi di level domestik dan internasional AS terhadap resolusi 2334.....	14
Gambar 2 David Ben Gurion saat Membacakan Deklarasi Kemerdekaan Israel pada tanggal 14 Mei 1948 di tel Aviv.....	23
Gambar 3 Pertemuan Presiden Amerika Serikat Harry Truman dan Presiden Pertama Israel, Chain Weizman.....	24
Gambar 4 Barack Obama melakukan kampanyenya yang bertema “Change We Can Believe In.....	30
Gambar 5 PM Benjamin Netanyahu, Presiden AS Barack Obama dan Presiden Palestina President Mahmoud Abbas selama pertemuan trilateral di New York, AS, 22 September 2009.....	32
Gambar 6 Pertemuan Barack Obama bertemu dengan Menteri Benjamin Netanyahu di Oval Office pada tahun 2016, membahas komitmen AS terhadap keamanan Israel.....	35
Gambar 7 Aksi Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu saat muncul dihadapan Kongres untuk melobi Kongres AS agar menentang kesepakatan AS – Iran.....	36
Gambar 8 Situasi anggota PBB saat melakukan pemungutan suara terhadap resolusi 2334 pada tanggal 23 Desember 2016 di Markas PBB di New York.....	43
Gambar 9 Pemukim yang terus meningkat per- tahun dari tahun 1967 hingga 2016.....	48
Gambar 10 Duta Besar AS untuk PBB saat berbicara kepada Dewan Keamanan PBB setelah menyatakan sikap Abstain terhadap resolusi 2334.....	50
Gambar 11 Jumlah Pembangunan Unit Rumah yang dilakukan Israel di Kawasan Jerrusalem Timur.	51
Gambar 12 Proses penghancuran permukiman Amona.....	54
Gambar 13 Kongres Amerika Serikat menentang Resolusi DK PBB nomor 2334, tentang sebuah kecaman terhadap pembangunan permukiman Yahudi di kawasan Palestina.	60

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keputusan Amerika Serikat terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2334 pada tanggal 23 Desember 2016 mengejutkan dunia internasional (Security Council, 2016). Pasalnya, selama ini Amerika Serikat selalu menentang atau memveto resolusi yang akan menyudutkan pihak Israel. Suatu contoh pada era Presiden Bill Clinton memberikan veto terhadap resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB pada tanggal 17 Mei 1995 terkait penjarahan tanah yang dilakukan oleh Israel di wilayah Jerrusalem Timur yang dinilai tidak sah. Sedangkan, pada tanggal 11 November 2011, Palestina gagal mendapatkan pangakuan dari PBB setelah veto dari Amerika Serikat Era kepemimpinan Presiden Barack Obama (Isyafli, 2012 : 111). Namun demikian, pada tahun akhir 2016 lalu, Amerika Serikat memberikan pernyataan yang mengejutkan karena Amerika Serikat mengambil langkah abstain terkait konflik Israel dan Palestina.

Keputusan Amerika Serikat di akhir kepemimpinan Presiden Barack Obama mengambil langkah berbeda, yaitu abstain dengan tidak memveto resolusi nomor 2334 yang isinya permukiman Yahudi di Palestina harus dihentikan karena melanggar hukum internasional (Nugraha, 2016). Sikap Amerika Serikat untuk tidak memveto resolusi 2334 ini menyebabkan lolosnya resolusi tersebut sehingga mengakibatkan Israel harus menghentikan aktivitas kependudukan permukiman Yahudi di Palestina.

Keputusan politik luar negeri Amerika Serikat terkait resolusi 2334 inipun juga tergolong unik. Selama ini jika kembali melihat sejarah politik luar negeri Amerika Serikat terhadap konflik Israel-Palestina, setiap keputusan yang diberikan selalu berat sebelah. Dukungan terhadap Israel lebih dominan dibanding Palestina jika menyangkut Resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB. Lebih uniknya lagi, Barack Obama mengambil langkah yang sangat berbeda menyangkut Israel-Palestina di akhir kepemimpinannya. Perbedaan sikap yang diberikan Presiden Barack Obama terhadap perdamaian konflik Israel-Palestina

terletak pada tahun 2011 dan 2016. Tidak adanya veto atau sikap abstain yang diberikan Presiden Barack Obama merupakan langkah baru yang terjadi dalam keputusan luar negeri Amerika Serikat terhadap konflik Israel Palestina.

Keputusan berbeda yang dilakukan Amerika Serikat juga terjadi dari dalam negeri maupun luar negerinya. Selama ini, kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat Era Obama jika berkaitan dengan Israel selalu sejalan dengan Kongres, namun terkait resolusi nomor 2334 menjadi berbeda. Keputusan politik luar negeri yang diambil Amerika Serikat era Barack Obama tidak sejalan dengan keputusan Kongres terkait pengambilan sikap terhadap resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB nomor 2334. Oleh sebab itu penulis menganggap bahwa langkah yang diambil Amerika Serikat era Obama cukup mengejutkan dikarenakan adanya perbedaan sikap antara di level domestik dan keputusan politik luar negerinya.

Politik luar negeri Amerika Serikat. di Era Barack Obama terkesan lebih diplomatis jika dibandingkan presiden sebelumnya yaitu George W. Bush. Barack Obama merupakan pemimpin yang menduduki jabatan sebagai presiden Amerika Serikat ke 44 selama dua periode. Dalam kepemimpinannya, Barack Obama terkesan lebih fokus dalam menjalankan penyelesaian konflik di kawasan Timur Tengah khususnya jika menyangkut konflik Israel dan Palestina.

Keterlibatan Amerika Serikat di Timur tengah sudah berlangsung sejak akhir perang dunia ke-II yang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah keberadaan minyak yang berlimpah serta untuk membendung pengaruh Uni Soviet. Pada dasarnya, alasan keamanan dan strategis masih mendasari ambisi Amerika Serikat untuk mengadakan intervensi di kawasan Timur Tengah. Intervensi yang dilakukan Amerika Serikat di Timur Tengah tentu tidak terlepas dari kepentingan nasional yang ingin dicapai.

Konflik Israel – Palestina di era Barack Obama merupakan salah satu isu paling dominan di Timur Tengah sehingga menyita perhatian dunia. Keberadaan Israel yang merupakan sekutu Amerika Serikat membuat keberadaan bangsa

Palestina semakin menderita. Aktivitas pendudukan yang dilakukan Israel di kawasan Palestina membuat rakyat Palestina harus terusir dari wilayahnya. Israel yang merdeka pada tanggal 14 Mei 1948, langsung mendapat pengakuan secara de facto oleh Amerika Serikat 15 Mei 1948 (Sodik, 2015). Presiden Amerika Serikat ke 33 yaitu Harry Truman langsung mengakui Israel 11 menit setelah di deklarasikan menjadi sebuah negara dan menjadikan Amerika sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Israel. Sejak saat itu Israel menjadi sekutu utama dari Amerika Serikat (AIPAC, 2010).

Dukungan yang diberikan Amerika Serikat terhadap Israel dapat didasarkan pada rasa simpati terhadap perjuangan yang telah dilakukan bangsa Israel untuk memperoleh tanah airnya terutama setelah bangsa Yahudi mengalami politik *Genocide*. Rasa simpati ini juga didukung oleh rakyat Yahudi di Amerika Serikat yang sampai saat ini memiliki pengaruh politis yang amat kuat terhadap kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah. Peran lobi Yahudi di Amerika Serikat sering dianggap sebagai penyebab utama kebijakan Amerika Serikat yang mendukung Israel, AIPAC salah satunya.

The American Israel Public Affairs Committee atau AIPAC merupakan salah satu kekuatan lobi Israel di Amerika Serikat. AIPAC merupakan salah satu akses lobi pro-Israel terhadap Amerika Serikat yang bertujuan mendesak kongres agar memberikan dukungan terhadap Israel (AIPAC, 2010). Lobi Yahudi yang tergabung dalam kelompok ini memiliki peran penting dalam mempengaruhi pembuat keputusan seperti halnya keputusan anggota Kongres serta pejabat Gedung Putih pro-Israel yang berkepentingan dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah, khususnya jika menyangkut Palestina. (You tube, 2010).

AIPAC setiap tahun mengadakan konferensi dengan mengundang pejabat dari seluruh Amerika dari Washington dan kelompok kuat yang dapat mempengaruhi undang-undang dan kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah. Sudah menjadi tradisi bahwa setiap pejabat yang datang dalam pertemuan antara

Amerika – Israel untuk menunjukkan diri bahwa dia pendukung AIPAC (Youtube, 2010).

Kebijakan luar negeri yang dijalankan Amerika Serikat tergantung pada siapa yang berkuasa, dan apa saja yang ingin dicapai. Hal ini tergantung pada keputusan Presiden. Keberadaan Israel yang strategis di kawasan Timur Tengah membuat Amerika Serikat selalu melindungi Israel. Masalah Israel merupakan salah satu isu penting dalam perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. bagi Amerika Serikat. Israel adalah negara penyangga untuk pengendalian di kawasan Timur Tengah, terutama untuk mengamankan sumber sumber minyak Amerika Serikat di Timur Tengah dan menangkal tumbuhnya kekuatan terorisme di kawasan tersebut, seperti perkembangan nuklir Iran dan kelompok kelompok terorisme yang banyak tersebar di kawasan Timur Tengah.

Hubungan Amerika Serikat dan Israel era Barack Obama justru semakin kuat. Kemenangan Barack Obama sebagai presiden Amerika Serikat tentu tidak terlepas dari campur tangan lobi Yahudi. Amerika Serikat berkomitmen untuk selalu memberikan bantuan finansial, teknologi, serta militer kepada Israel dengan cara terbuka. Hal tersebut dapat dibuktikan dari sikap Amerika Serikat yang menjamin keamanan Israel menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari politik luar negeri Amerika Serikat. Sebab, setiap tahun tercatat bahwa Israel adalah negara yang paling banyak mengantongi dana bantuan militer Amerika Serikat, yang jumlahnya cukup besar sekitar 3,1 milyar Dollar Amerika Serikat (Rubrik, 2016). Selama kepemimpinan Barack Obama, Amerika Serikat memberikan dukungan materil lebih banyak terhadap Israel dibandingkan presiden Amerika Serikat sebelumnya. Kerjasama yang dilakukan antara Amerika Serikat & Israel meliputi di segala bidang khususnya keamanan, energi, pengembangan sains, riset, pertanian, perdagangan dan ekonomi serta bebas visa bagi kewarganegaraan Israel untuk berkunjung ke Amerika Serikat. sementara itu, jumlah nilai senjata & amunisi yang ditimbun Amerika di Palestina atas pendudukan Israel mencapai 1,08 milyar dollar (IRIB, 2014).

Konflik Israel Palestina sudah berlangsung sejak tahun 1967 (Holmes, 2011). Dalam penyelesaian konflik Israel–Palestina, Presiden Barack Obama telah mengupayakan berbagai cara untuk mencapai solusi dua negara, meskipun pada akhirnya keputusan Obama cenderung lebih berpihak pada Israel di kepemimpinan Periode pertama. Pada tanggal 11 November 2011, Palestina gagal mendapatkan pengakuan setelah ancaman veto yang diberikan Amerika Serikat di sidang PBB yang dilaksanakan di New York terkait pengajuan Palestina sebagai anggota tetap PBB.¹ Dalam hal ini terlihat jelas bahwa Amerika Serikat selalu berkomitmen untuk melindungi sekutunya yaitu Israel. Setelah perjuangan panjang yang dilakukan Palestina terhadap PBB nyatanya sia-sia untuk menjadikan negara tersebut anggota PBB setelah veto yang diberikan Amerika Serikat. Terkait konflik Israel – Palestina Barack Obama masih memiliki komitmen untuk menjadikan Israel sebagai mitra strategis yang wajib dilindungi keamanannya, sebagaimana sejarah terdahulu.

Pada tanggal 23 Desember 2016 Dewan Keamanan PBB melakukan pemungutan suara terkait aktivitas pendudukan permukiman Yahudi di tanah Palestina. Pemungutan suara tersebut ialah resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB nomor 2334 mengenai penghentian permukiman yahudi di kawasan Palestina. Amerika Serikat mengambil sikap abstain terhadap resolusi tersebut. Hal ini merupakan sejarah baru bagi Amerika Serikat dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah khususnya konflik Israel – Palestina, khususnya era Presiden Barack Obama. Sebelumnya pada tahun 2011 AS memberikan veto atas keinginan Palestina untuk menjadi anggota tetap di PBB yang membuat Israel semakin leluasa untuk melancarkan pendudukannya di tanah Palestina. Akan tetapi, pada tanggal 23 Desember 2016, Amerika Serikat

¹ Wakil sekretaris-jenderal politik luar negeri Amerika Serikat B. Lynn Pascoe menyampaikan dalam sidang DK PBB pada 27 september 2011 bahwa Palestina harus memulai perundingan damai kembali dengan Israel. Ia mengatakan bahwa pencalonan Palestina menjadi anggota tetap PBB merupakan langkah sepihak, kontraproduktif. Dan pada 11 november 2011 DK PBB gagal mencapai kesepakatan mengenai upaya Palestina untuk menjadi anggota tetap DK PBB dan mengeluarkan veto terhadap resolusi tersebut....selengkapnya dapat dilihat di <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/8955/bab%20iii.pdf?sequence=4&isAllo wed=y> diakses pada tanggal 1 maret 2017

menyatakan sikap berbeda terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2334.

Dewan Keamanan PBB, mengeluarkan resolusi 2334 terkait konflik Israel – Palestina (Council, 2016) pemungutan yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB terkait resolusi 2334 atas permintaan empat negara yaitu, Malaysia, Venezuela, Selandia Baru dan Senegal (Nugraha, 2016). Resolusi 2334 mengutuk kegiatan Israel yang menduduki wilayah Palestina sejak tahun 1967, termasuk di wilayah Yerusalem Timur, dimana pembangunan dan perluasan permukiman yang dilakukan Israel berupa penyitaan tanah, pembongkaran rumah terhadap warga Palestina melanggar hukum internasional (Council, 2016). Resolusi 2334 ini disetujui oleh 14 anggota Dewan Keamanan PBB (Tiongkok, Perancis, Rusia, Britania Raya, Angola, Jepang, Malaysia, Mesir, Selandia Baru, Sinegal, Spanyol, Ukraina, Uruguay, Venezuela) dan 1 abstain (Amerika Serikat). Sikap abstain yang dijatuhkan Amerika Serikat di akhir kepemimpinan Barack Obama merupakan langkah baru setelah delapan tahun pemerintahannya terkait konflik Israel-Palestina.

Sikap abstain atau sikap tidak memveto yang di jatuhkan Amerika Serikat pada sidang PBB pada tanggal 23 desember 2016, menimbulkan adanya kecaman dari PBB untuk Israel. Fakta lain yang harus dihadapi Israel atas lolosnya resolusi 2334 ialah pembongkaran permukiman Yahudi yang telah di bangun Israel di Tanah Palestina. adapun inti dari resolusi 2334 ialah kegiatan tersebut tidak memiliki keabsahan hukum dan merupakan pelanggaran hukum internasional (Makovsky, 2016).

Sikap Amerika Serikat terhadap resolusi 2334 yang merupakan wajah baru baru terkait politik luar negeri Barack Obama terhadap Israel. Resolusi 2334 dapat mendorong penuntutan di Den Haag untuk terus maju ke tahap awal pemeriksaan hingga penyeledikan wilayah permukiman (APN, 2016). Pasalnya selama ini Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Barack Obama selalu membela jika menyangkut kepentingan Israel. Menteri luar negeri Amerika Serikat, John Kerry

mempertegas keputusan negaranya untuk meneruskan resolusi yang dikeluarkan PBB, dengan meminta Israel mengakhiri pendudukannya atas Palestina. Adapun isi inti dari resolusi 2334 tersebut ialah : *menetapkan bahwa permukiman Yahudi tidak memiliki dasar hukum yang sah dan berbahaya bagi penerapan solusi dua Negara* (Hernawan, 2016). Resolusi 2334 ini tentu akan berakibat serius bagi keberadaan permukiman Yahudi yang berdiri di tanah Palestina. Sebab lolosnya resolusi yang dikeluarkan Dewan keamanan PBB nomor 2334 tersebut akan mengakibatkan penghancuran permukiman Yahudi di Palestina.

Amerika Serikat yang merupakan mitra kerjasama Israel, justru meminta Israel menghentikan kegiatan pembangunannya di Palestina melalui resolusi 2334. Perubahan sikap yang dilakukan Presiden Barack Obama terhadap politik luar negeri Amerika Serikat menimbulkan pertanyaan bagi penulis. Sebab, keputusan Barack Obama untuk tidak memveto resolusi 2334 ternyata tidak mendapatkan dukungan dari Kongres. Kongres Amerika Serikat menganggap bahwa resolusi 2334 merupakan langkah sepihak yang akan membahayakan keamanan Israel (AIPAC, 2017). Kongres Amerika Serikat justru mendesak Barack Obama untuk memberikan veto terhadap Resolusi 2334. Sikap DPR AS yang tidak mendukung resolusi 2334 dikarenakan resolusi tersebut dianggap menggagalkan upaya perdamaian Israel – Palestina untuk tahap negosiasi secara langsung (Congress, 2017).

Kongres Amerika Serikat juga mendesak Presiden Amerika Serikat untuk memberikan keputusan pada Konferensi Paris yang diadakan pada 15 Januari 2017 dengan 2 tuntutan. *Pertama*, Administrasi Presiden Amerika Serikat agar menjatuhkan veto terhadap semua resolusi Dewan Keamanan yang mengakui tindakan sepihak oleh Palestina atau penyelesaian batas waktu konflik Israel – Palestina. *Kedua*, Administrasi Presiden yang akan datang diharapkan dapat bekerja sama dengan Kongres untuk menciptakan perdamaian antara Israel – Palestina dengan tujuan mencapai kesepakatan dua belah pihak (Congress, 2017). AIPAC juga memberikan pernyataan yang hampir senada dengan Kongres Amerika Serikat. AIPAC menganggap bahwa PBB bukan tempat yang tepat untuk

menyelesaikan konflik kedua negara, akan tetapi resolusi 2334 justru akan menghambat proses perdamaian konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina (AIPAC, 2017).

Dengan demikian, keputusan Resolusi 2334 yang disahkan Dewan Keamanan PBB, pada 23 desember 2016 ini tentu menarik jika dijadikan sebagai bahan bagian dari penelitian studi Hubungan Internasional. Keputusan Amerika Serikat dalam memberikan dukungan terhadap Palestina melalui resolusi nomor 2334 dengan cara tidak memveto resolusi tersebut menimbulkan asumsi bagi penulis terutama keputusan ini di ambil akhir pemerintahan Presiden Barack Obama. Sikap ketidakselarasan antara keputusan Barack Obama dengan kongres Amerika Serikat menjadikan penulis untuk tertarik menulis karya ilmiah ini.

Hal ini tentu sangat relevan dengan studi Hubungan Internasional karena sikap Amerika yang memberikan putusan tersebut tidak menutup kemungkinan nantinya akan memberikan dampak bagi hubungan Amerika Serikat-Israel. Selain itu keputusan Amerika Serikat terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2334 juga sebuah fenomena baru yang dilakukan negara adidaya tersebut terhadap konflik Israel Palestina. Perbedaan sikap yang dilakukan Amerika Serikat terhadap konflik Israel Palestina merupakan fenomena baru terjadi dalam politik luar negeri Amerika Serikat. jika dulu selalu memberikan veto terhadap resolusi yang mengancam Israel, saat ini justru tidak memberikan keputusan apapun atau abstain, ini merupakan fenomena baru yang belum terjadi sebelumnya dalam politik luar neger Amerika Serikat. Selain itu, sikap politik luar negeri Amerika Serikat Era Barack Obama juga menjadi pertanyaan besar bagi penulis. Keputusan yang berbeda antara level domestik dan level internasional menimbulkan teka-teki bagi penulis dalam politik luar negeri Amerika Serikat di Era Barack Obama..

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis memutuskan untuk menganalisis permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul :

“SIKAP AMERIKA SERIKAT TERHADAP RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NOMOR 2334 ERA BARACK OBAMA”

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan diperlukan karena dalam suatu penelitian membutuhkan batasan-batasan yang jelas terhadap suatu fenomena yang akan diteliti. Disamping itu pembatasan dalam lingkup pembahasan juga diperlukan untuk mempermudah penulis dalam melakukan sebuah penelitian. Batasan-batasan tersebut bermaksud agar karya tulis ilmiah agar lebih fokus terhadap pokok permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penulisan karya ilmiah ini, ruang lingkup pembahasan dibagi menjadi dua yaitu, batasan materi dan batasan waktu.

1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi menunjukkan fokus dari penulisan karya ilmiah. Adapun fokus dari penulisan karya tulis ilmiah pada skripsi ini mengenai alasan Presiden Barack Obama mengenai perubahan politik luar negeri Amerika Serikat khususnya pada konflik di Israel – Palestina terkait Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2334. Batasan materi yang digunakan penulis ingin mengetahui alasan Amerika Serikat era Presiden Barack Obama abstain terhadap resolusi 2334. Keputusan yang diberikan presiden Barack Obama serta Kongres Amerika Serikat juga menjadi batasan materi dalam penulisan karya ilmiah ini.

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu digunakan untuk mengetahui rentang waktu yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini. Adapun tujuan penulis melakukan batasan waktu pada karya tulis ilmiah adalah untuk meminimalisir terjadinya kesalahfahaman terhadap hasil penelitian. Batasan waktu yang digunakan penulis dalam karya tulis ilmiah ini dimulai pada tahun 2009 sampai awal tahun 2017. Tahun 2009 dipilih karena pada tahun ini merupakan awal kepemimpinan presiden Barack Obama yang merupakan periode pertama Obama menjabat sebagai pemimpin Amerika Serikat. Kemudian pada batas akhir penulis mengambil pada awal tahun 2017, saat Presiden Barack Obama mengakhiri kepemimpinannya sebagai Presiden Amerika Serikat.

Awal kepemimpinan Barack Obama menjadi penting untuk dianalisis, karena terdapat beberapa pidato serta janji kampanye Obama terhadap dunia muslim. Selain itu di akhir kepemimpinan Barack Obama menjadi penting karena menjawab rumusan masalah dalam karya ilmiah ini. Dimana, di akhir kepemimpinan Barack Obama, Amerika Serikat abstain terhadap resolusi DK PBB nomor 2334.

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah di jabarkan diatas mengenai pola politik luar negeri Amerika Serikat Era Barack Obama terhadap konflik Israel Palestina menjadi pertanyaan besar bagi penulis dalam karya ilmiah ini. Sikap Amerika Serikat yang awalnya selalu memveto, dan sekarang Abstain merupakan fenomena baru. Selain itu juga perbedaan sikap yang terjadi di level domestik dan internasional juga menjadi pertanyaan besar bagi penulis.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, Maka rumusan masalah yang ditetapkan oleh penulis adalah :

“Mengapa terjadi dua respon yang berbeda terkait sikap Amerika Serikat terhadap Resolusi DK PBB nomor 2334?”

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan yang mendasari keputusan Amerika Serikat Abstain terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2334, mengenai konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. sebab, keputusan Amerika Serikat terkait resolusi 2334 di Era Barack Obama merupakan langkah yang sangat berbeda. Pertama, di level internasional Amerika Serikat memilih sikap abstain terhadap resolusi DK PBB nomor 2334. Kedua, di level domestik kongres AS tidak sepakat dan mendesak Obama untuk memveto resolusi tersebut. namun demikian Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Barack Obama tetap mengambil langkah abstain terhadap resolusi DK PBB nomor 2334. Perbedaan sikap di level domestik dan level internasional inilah yang mendasari penulis, melakukan penelitian ini.

1.5 Landasan Konseptual

Landasan Konseptual dibutuhkan dalam penulisan karya ilmiah karena bertujuan sebagai instrumen pembantu bagi penulis dalam melakukan penelitian yang akan di analisa. Keberadaan kerangka pemikiran sangat penting dalam suatu penelitian. Kerangka pemikiran menunjukkan posisi penulis dalam melihat fenomena yang sedang di teliti. Untuk menjelaskan alasan yang dilakukan Barack Obama dalam memberikan sikap abstain inipenulis memutuskan untuk menggunakan Konsep Two Level Games yang dicetuskan oleh Robert Putnam.

1.5.1 Konsep Two Level Games

Konsep Two Level Game ini di cetuskan oleh Robert D. Putnam. Konsep ini menjelaskan bahwa diplomasi merupakan proses yang tidak hanya terjadi di level internasional namun juga di level domestik (Putnam, 1998 : 432-443). Two level games dapat dikatakan sebagai politik negosiasi internasional. Pada level domestik, biasanya terjadi sebuah kebijakan untuk mendesak pemerintah yang bertujuan guna menguntungkan para politisi atau pejabat yang tergabung dalam sebuah kelompok kelompok politik atau biasa disebut koalisi. Sedangkan di level internasional, sebuah negara akan memaksimalkan kemampuan guna memenuhi kebutuhan domestik serta mempertimbangkan langkah politik luar negeri sebuah negara. Selain itu di kancah internasional, seorang negosiator yang merupakan presiden atau menteri luar negeri, memaksimalkan kemampuannya dalam memenuhi tekanan dari dalam negeri dan meminimalkan konsekuensi yang merugikan di dalam kancah dunia yang bertugas sebagai negosiator. (Putnam, 1998 : 434). Konsep two Level Game ini merupakan konsep yang digagas untuk jangka pendek.

Posisi negosiator selalu berusaha menemukan kesepakatan yang menarik bagi konstituennya untuk meratifikasi suatu perjanjian. Untuk mencapai persetujuan antara kedua belah yaitu di level 1 (domestik) dan level 2 (internasional). evel yang dimaksudkan di dalam two level games ini ini diartikan sebagai proses tawar menawar yang dilakukan negosiator yang mengarah pada sebuah persetujuan. Seorang negosiator juga akan melakukan negosiasi secara terpisah baik pada level domestik maupun internasional untuk mencapai

kesepakatan bersama. Namun adanya negosiasi yang secara terpisah, akan menimbulkan sebuah peluang perbedaan kesepakatan yang berujung keberhasilan atau ketidaksetujuan dalam sebuah ratifikasi yang membuat dilema. Oleh karena itu untuk menengahi adanya perbedaan pendapat, perlu adanya konstituensi leel yang dapat ditempatkan oleh persetujuan akhir yang nantinya akan dimenangkan disebut dengan istilah WIN-SET.

Pada tingkat I, tawar menawar yang dilakukan negosiator hanya untuk menemukan kesepakatan sementara. Sedangkan pada tingkat II, adanya diskusi yang terpisah dalam masing masing kelompok tentang sebuah perjanjian yang akan diratifikasi. Dalam konsep two level game ini, Putnam memaparkan terdapat 3 determian penting yang dapat mempengaruhi jangkauan win-sets yang disebut dengan *determinants of the win-set* sebagai berikut :

a. Ukuran *win-set* tergantung pada kekuasaan, preferensi, maupun koalisi yang memungkinkan adanya komponen – komponen di tingkat II.

Ukuran *win-set* itu relatif, tergantung pada tekanan isolasionis (kelompok yang menentang kerja sama internasional) dan Internasionalis (yang menawarkan dukungan untuk tujuan bersama).

b. Ukuran dari *win-sets* yang tergantung pada lembaga politik di tingkat II.

Hal ini membahas mengenai kekuatan negara serta otonomi negara yang merupakan suatu hal yang relevan. Semakin besarnya otonomi dalam pengambilan keputusan pusat di tingkat II, maka semakin besar win-sets mencapai kesepakatan internasional.

c. Ukuran *win sets* tergantung pada berbagai strategi yang dilakukan negosiator di tingkat I.

Dalam hal ini setiap negosiator di tingkat I memiliki sebuah kepentingan tegas saat memaksimalkan *win-sets* pihak (Putnam, 1998 : 437).

Kepala negosiator adalah satu-satunya penghubung tingkat I dan tingkat II secara formal. Kepala negosiator ialah penengah dalam negosiasi di level satu dan level dua. Kepala negosiator bisa langsung presiden, maupun perwakilan negara yang hadir dalam proses ratifikasi, menteri luar negeri misalnya.

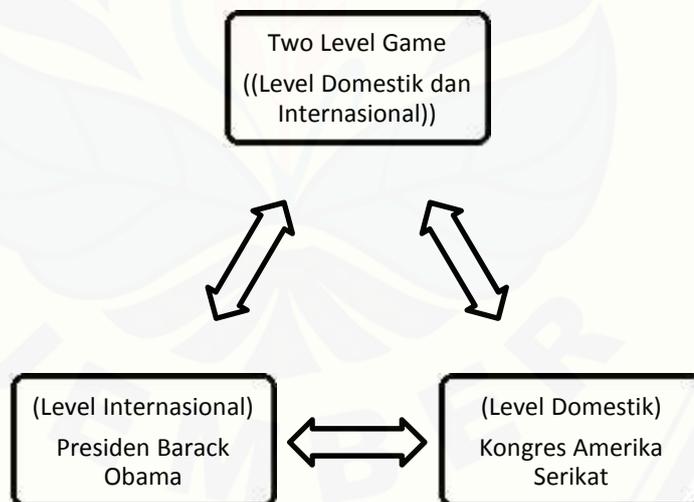
Konsep *Two Level Game*, posisi kepala negosiator lebih mengutamakan kepentingan domestik. Akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa kepala negosiator mempersiapkan sebuah perjanjian internasional untuk diratifikasi. Negosiator pada tingkat I biasanya sering terjadi kesalahfahaman mengenai informasi terhadap permainan politik tingkat II, terutama bagi mereka yang berada di posisi lawan arah. Ketidakpastian mengenai tolak ukur *win-sets* dapat menjadi batu sandungan dalam perundingan dua level. Sebuah transaksi dapat ditingkatkan apabila tercapainya kesepakatan yang substansif, meskipun pemimpin terkadang bisa saja mendapatkan suatu keuntungan domestik melalui tolakan keras dari kesepakatan internasional yang ditawarkan. Sebuah ketidakpastian dalam meningkatkan *win-sets* dapat menimbulkan resiko pembelotan secara paksa. Transaksi hanya dapat dilakukan jika negosiator memiliki keyakinan bahwa kesepakatan yang di usulkan ialah *win-sets* yang berlawanan di dalamnya. Dengan demikian maka kesepakatan atau perundingan dapat disahkan.

Para perumus kebijakan luar negeri adalah orang-orang yang dihadapkan kepada situasi-situasi tertentu, yang bertanggung jawab atas suatu keadaan yang ditekan oleh beragam kondisi dan dipaksa untuk mengambil keputusan. Perumusan kebijakan politik luar negeri dipengaruhi oleh berbagai problema keputusan yang dihadapi oleh pengambil keputusan yang timbul akibat sifat keputusan luar negeri tertentu serta konteks organisasional dimana itu merupakan tempat para pengambil keputusan beroperasi.

Menurut sifat politik luar negeri, jenis keputusan luar negeri dibagi menjadi tiga. *Pertama*, keputusan-keputusan politik luar negeri yang sifatnya umum. Kebijakan politik luar negeri yang bersifat umum terdiri atas serangkaian keputusan yang di ekspresikan melalui pernyataan-pernyataan kebijakan dan tindakan-tindakan langsung. Kebijakan jenis ini biasanya bersifat konsisten karena saling mendukung satu sama lain, baik kebijakan dalam negerinya maupun luar negeri. *Kedua*, keputusan-keputusan yang bersifat administratif. Tipe jenis ini merupakan keputusan yang dibuat oleh anggota birokrasi pemerintah yang bertugas melaksanakan hubungan luar negeri negaranya. *Ketiga*, keputusan-

keputusan yang bersifat krisis. Tipe ini merupakan jenis pengambilan keputusan kombinasi dari poin pertama dan kedua. Keputusan krisis diarahkan kepada situasi-situasi kritis yang memiliki efek menjangkau dunia internasional. Suatu keputusan krisis sangat diperlukan untuk meyakinkan lawan bahwa posisi tawar menawarnya sudah tidak memadai (Coplin, 1992 : 32 - 35)

Pada Intinya, konsep *Two Level Game* merupakan kebijakan yang dinegosiasikan sebagai sebuah alternatif dari status quo dari kelompok-kelompok yang terbentuk di level II. Menurut Putnam, konsep *Two Level Game* ialah bagaimana suatu negara bukan hanya dilihat sebagai entitas tunggal melainkan sebagai kesatuan kelompok-kelompok di dalamnya. Berdasarkan pemikiran ini kebijakan atau keputusan yang diambil negara tidak hanya dipandang sebagai hasil yang diadopsi dari proses negosiasi kelompok di level domestik. Dimensi politik internasional dan politik domestik dapat mempengaruhi kebijakan atau keputusan politik luar suatu negeri negara.



Gambar 1 Merupakan Penggambaran Sederhana Mengenai Permainan 2 tingkat yang terjadi di level domestik dan internasional AS terhadap resolusi 2334

Penulis dalam penelitian ini memilih untuk menggunakan konsep *Two level Game* karena dianggap relevan untuk menjelaskan permasalahan, yaitu mengapa secara tiba-tiba Amerika Serikat tidak memveto resolusi Dewan Keamanan PBB

nomor 2334 sedangkan kongres meminta Presiden untuk memberikan Veto. Dalam studi kasus yang diangkat penulis terdapat dua tahapan dalam proses penyelesaian konflik Israel – Palestina. Pada tingkat I, disebutkan bahwa terjadi tawar menawar antara negosiator untuk menemukan kesepakatan sementara. pada tingkatan ini, penulis menggambarkan posisi level domestik sebagai tingkat I yang diwakili oleh keberadaan kongres. Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang sebelumnya bahwa, Kongres Amerika Serikat meminta Barack Obama untuk memberikan veto terhadap resolusi 2334 yang dilaksanakan pada 23 Desember 2016, akan tetapi hal tersebut tidak dijalankan Presiden sebagai pihak eksekutif negara. Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Barack Obama justru mengambil sikap abstain terhadap resolusi yang ditawarkan Dewan Keamanan PBB nomor 2334. Terjadi dua sikap berbeda dalam pengambilan keputusan politik luar negeri Amerika Serikat Era Barack Obama terkait Resolusi 2334, yaitu sikap Presiden dan Kongres.

Kongres Amerika Serikat menganggap bahwa Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2334 bukan solusi utama dalam menyelesaikan perdamaian pada konflik Israel-Palestina. Selama ini Amerika Serikat mendukung adanya solusi dua negara, akan tetapi bukan melalui jalan Resolusi. Dalam hal ini desakan yang dilakukan Kongres terhadap pimpinan negosiator masih bersifat sementara yang belum menghasilkan kesepakatan. Sedangkan pada tingkat II disebutkan bahwa, diskusi yang terpisah dalam masing masing kelompok tentang bagaimana meratifikasi sebuah perjanjian. Dalam tingkat II penulis menggambarkan sikap Amerika Serikat di dalam Dewan Keamanan PBB yang memberikan sikap terhadap resolusi 2334 yang diusulkan oleh 4 negara yaitu, Malaysia, Venezuela, Selandia Baru, dan Sinegal (BBC, 2016).

Melalui Dewan Keamanan resolusi 2334 mulai diwacanakan, dibentuk, dan mencari dukungan untuk dapat disahkan. Dalam hal ini posisi pengambilan keputusan masuk pada level tingkat II. Pada tingkat II, adanya diskusi yang terpisah dalam masing masing kelompok tentang sebuah perjanjian yang akan diratifikasi. Peran Amerika Serikat pada tingkat II ialah memberikan keputusan sebagai anggota tetap PBB yang nantinya akan memberikan keputusan final.

Diskusi terpisah yang dimaksud di tingkat II berbeda, jika pada tingkat I kelompok tawar menawar yang dimaksud adalah Kongres dan kepala negosiator (Presiden).

Perbedaan sikap yang terjadi di level domestik dan level internasional terkait pengambilan keputusan politik luar negeri Amerika Serikat, terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2334 merupakan langkah baru yang diambil Barack Obama. Sikap Abstain yang diberikan oleh Amerika Serikat era Barack Obama terhadap resolusi yang dikeluarkan DK PBB nomor 2334, merupakan langkah baru dalam menyikapi konflik Israel dan Palestina. Sebab, selama ini Amerika Serikat jika menyangkut konflik Israel dan Palestina selalu membela Israel yang merupakan sekutunya. Sebelum keputusan Abstain yang diberikan Amerika Serikat terhadap resolusi 2334 pada tahun 2016, Obama juga pernah melakukan ancaman veto terhadap Palestina di tahun 2011. Dalam hal ini, Barack Obama melakukan dua perbedaan sikap jika menyangkut konflik Israel dan Palestina di masa kepemimpinannya sebagai Presiden Amerika Serikat.

Sikap yang diberikan Amerika Serikat, baik di level domestik dan internasional terhadap Resolusi DK PBB nomor 2334 mengalami perbedaan. Pada level domestik, Amerika Serikat melakukan penolakannya terhadap resolusi 2334 dengan cara mengutuk keputusan Obama untuk abstain pada resolusi tersebut. Sedangkan, di level internasional, Amerika Serikat tetap melakukan keputusan Abstain terhadap resolusi 2334 yang diwakili oleh Samantha Power dalam pemungutan suara (BBC, 2016).

1.5.2 Konsep Kebijakan Luar Negeri

Politik atau kebijakan luar negeri dapat dikatakan sebagai action theory, yang merupakan suatu kebijaksanaan negara terhadap negara lain yang bertujuan untuk suatu kepentingan. Secara umum politik luar negeri ialah suatu nilai, arah, sikap serta tujuan dalam mempertahankan, mengamankan sebuah kepentingan nasional dalam dunia internasional. Sedangkan studi politik luar negeri menurut Henry Kissinger merupakan sebuah interaksi yang berada di antara aspek domestik dan internasional dalam kehidupan suatu negara (Perwita & Yani, 2005 : 47-49).

Kebijakan luar negeri adalah sebuah strategi untuk menghadapi politik internasional lain yang dibuat oleh pembuat keputusan suatu negara yang memiliki tujuan tertentu. Kebijakan luar negeri menurut Rosenau adalah upaya yang dilakukan suatu negara melalui sikap dalam mengatasi serta memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternal (Perwita & Yani, 2005 : 49-50).

Penulis menggunakan konsep kebijakan luar negeri karena dianggap relevan dengan penelitian ini. Keputusan Amerika Serikat yang mengambil langkah abstain terhadap resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB nomor 2334 ialah sebuah momen yang tepat bagi Barack Obama untuk menunjukkan keseriusannya dalam menangani konflik Israel – Palestina. selain itu, Barack Obama juga ingin mengembalikan citra Amerika Serikat terhadap dunia internasional khususnya masyarakat muslim yang tercermin pada pidato Barack Obama saat di Mesir.

Pengambilan sikap abstain yang dilakukan Barack Obama terhadap resolusi 2334 ialah untuk memanfaatkan waktu yang strategis untuk menyelamatkan Palestina dari permukiman Yahudi yang terus menerus terjadi. Selain itu, sikap abstain yang diambil Amerika Serikat terhadap resolusi 2334 ialah momen strategis untuk mengembalikan kepercayaan dunia terhadap AS sekaligus memenuhi janji Barack Obama mengenai perubahan pada slogan kampanye nya yang berjudul Change Believe in. Barack Obama sengaja mengambil keputusan abstain diakhir kepemimpinannya karena dianggap ini adalah hal yang tepat untuk menyelamatkan Palestina tanpa harus mengganggu kekuasaan Obama selama menjabat sebagai presiden. Hal ini tentu tidak terlepas dari usaha Barack Obama dalam memperbaiki citra aamerika Serikat melalui resolusi DK PBB nomor 2334.

Oleh sebab itu, untuk menganalisis rumusan masalah dalam penelitian yang berjudul “Keputusan Amerika Serikat Abstain terhadap Resolusi DK PBB nomor 2334 Era Barack Obama” penulis menggunakan konsep Two Level Game dan Kebijakan Luar Negeri.

1.6 Argumen Utama

Argumen utama merupakan jawaban sementara penulis terhadap karya tulis ilmiah. Sesuai dari latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka argumen sementara dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Perbedaan sikap Amerika Serikat terhadap resolusi DK PBB nomor 2334, di level domestik dan internasional merupakan suatu langkah untuk mengambil keuntungan di dua pihak. Di level domestik, Amerika Serikat berusaha menjaga hubungan baik dengan Israel yang merupakan sekutunya melalui penolakan yang dilakukan kongres atas sikap abstain AS terhadap resolusi nomor 2334. Sedangkan di level internasional, Amerika Serikat menunjukkan sikap abstain terhadap resolusi 2334 untuk membuktikan pada dunia internasional bahwa AS dibawah kepemimpinan Presiden Barack Obama berusaha keras untuk penyelesaian konflik Israel dan Palestina. selain itu, sikap abstain yang dilayangkan Amerika Serikat terhadap resolusi DK PBB nomor 2334 ialah, untuk memperbaiki citra AS terhadap dunia muslim khususnya era Barack Obama.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu langkah yang sistematis dalam suatu penelitian dan memiliki peranan yang penting. Penggunaan metode dalam suatu penelitian bertujuan untuk mendapatkan kerangka berfikir dan data data yang dibutuhkan serta membuat karya tulis ilmiah yang memiliki langkah-langkah sistematis, ilmiah, dan kronologis.

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan pihak lain dan bukan pengamatan secara langsung. Yang berarti penulis tidak berinteraksi secara langsung dengan obyek kajian (Moleong, 1995:62). Metode penulisan seperti ini juga disebut sebagai studi kepustakaan. Untuk mendapatkan data, maka penulis menggunakan data dari :

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
2. Ruang Baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Literatur yang penulis dapatkan berasal dari :

1. Media Cetak
2. Buku
3. Situs Internet
4. Jurnal dan buku elektronik (e-book)

1.7.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menerangkan bagaimana prosedur penulis dalam memperoleh data-data yang digunakan dalam menyusun sebuah penelitian (Moleong, 1995:51). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Penulis menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif karena sebuah data yang diperoleh tidak bisa diukur secara statistik matematis. Teknik analisis data deskriptif kualitatif hanya mendeskripsikan sebuah data dan menggambarkan suatu fenomena secara riil dan apa adanya, sehingga penulis tidak memberi sebuah interpretasi sendiri (Kartono, 1990).

Metode ini memfokuskan suatu masalah dimana dalam prosesnya tidak sekedar mengumpulkan dan mengolah data. Pada metode penelitian ini, penulis dituntut untuk dapat meneliti, menganalisis, menginterpretasikan, menjelaskan serta membuat kesimpulan masalah suatu fenomena. Dengan harapan dapat menyusun karya ilmiah secara sistematis agar isi dari karya ilmiah ini dapat dipahami.

1.8 Sistematika penulisan

Adapun dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis akan menyusunnya berdasarkan sistematika yang dibedakan dalam lima bab yang tersusun sebagai berikut :

Bab 1. Pendahuluan

Pada bab ini akan dijabarkan terkait dengan latar belakang, ruang lingkup pembahasan yang mencakup batasan waktu dan materi, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka dasar pemikiran, argumen utama, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2. Hubungan Amerika Serikat dan Israel Era Barack Obama

Bab II, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu gambaran secara umum adanya keterlibatan Amerika Serikat di Timur Tengah. Selanjutnya pada bab ini penulis juga menjelaskan tentang sejarah Hubungan Amerika Serikat dan Israel, khususnya pada kepemimpinan Presiden Barack Obama yang terbagi atas dua periode, yaitu tahun 2009 sampai dengan 2013 dan 2013 hingga awal tahun 2017.

Bab 3. Sikap Amerika Serikat terhadap Resolusi PBB terkait Konflik Israel-Palestina.

Bab III akan membahas mengenai isi daripada Sikap yang diberikan Amerika Serikat terhadap setiap Resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB menyangkut konflik Israel-Palestina, khususnya banyak membahas mengenai Resolusi 2334. Dalam bab ini juga menjelaskan isi, fungsi, tujuan, dan inti yang tercantum pada Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2334 dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina.

Bab 4. Alasan Amerika Serikat Abstain terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2334 tentang Permukiman Yahudi di palestina.

Dalam bab ini akan dibahas apa yang menjadi alasan Amerika Serikat tidak memveto resolusi 2334. Bab ini juga akan menganalisis faktor faktor penyebab serta alasan Presiden Barack Obama tidak menjatuhkan veto terhadap resolusi 2334 yang menyebabkan lolosnya resolusi tersebut hingga perundingan di Den Haag.

Bab 5. Kesimpulan

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang berisi hasil pembahasan dalam penelitian yang diambil dari bab-bab sebelumnya.

BAB 2 HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT DAN ISRAEL ERA PRESIDEN BARACK OBAMA

Bab 2, penulis akan menjabarkan secara khusus mengenai Hubungan Amerika Serikat dan Israel era Presiden Barack Obama. Namun demikian, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan kepentingan serta keterlibatan Amerika Serikat dalam kebijakan luar negerinya di kawasan Timur Tengah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas bagaimana strategi yang dilakukan pendahulu Presiden Amerika Serikat dalam memainkan kepentingannya di kawasan Timur Tengah. Selain itu, penulis ingin mengetahui apa keistimewaan hubungan kedua negara tersebut, sehingga Amerika Serikat menjadikan Israel sebagai mitra strategis atau sekutu negara superpower sampai saat ini.

Keterlibatan Amerika Serikat di Timur Tengah sudah berlangsung sejak akhir Perang Dunia ke II. Timur Tengah merupakan kawasan yang menjadi titik utama konflik dunia yang menjadi pusat perhatian global. Secara geografis kawasan Timur Tengah memiliki posisi yang strategis, hal itu dikarenakan posisinya berada di antara 3 benua yaitu Eropa, Asia, dan Afrika (Dipoyudo, 1977:43). Posisi kawasan Timur Tengah yang dinilai strategis menjadikan kawasan tersebut tidak lepas dari arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Adapun upaya intervensi Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah dilatarbelakangi oleh penemuan pertambangan minyak secara besar-besaran sekitar tahun 1930-an (Jatmika, 2000:11). Selain keberadaan minyak yang dominan, demokratisasi dan menyokong eksistensi Israel merupakan prioritas utama dalam arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah. Karena adanya prioritas tersebut penulis berasumsi bahwa Israel merupakan mitra strategis utama bagi Amerika Serikat di Kawasan Timur Tengah.

Negara negara yang berada di kawasan Timur Tengah, mayoritas mengalami konflik yang berkepanjangan. Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina merupakan salah satu contoh konflik di kawasan Timur Tengah. Konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah tidak selalu disebabkan oleh faktor internal, melainkan juga adanya faktor eksternal yang memiliki kepentingan di

kawasan tersebut. Amerika Serikat merupakan salah satu negara superpower yang menjadi faktor eksternal terhadap intervensi konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, khususnya jika menyangkut konflik Israel – Palestina.

Posisi Amerika Serikat jika menyangkut perdamaian di Timur Tengah, terutama konflik Israel – Palestina selalu memberikan hak yang istimewa terhadap negara Israel. Sikap demikian disebabkan oleh posisi Israel yang merupakan mitra strategis atau sekutu Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Hal ini tentu menyulitkan Negara-negara lain dalam membantu proses perdamaian yang terjadi di antara Israel dan Palestina. Posisi Amerika Serikat yang menduduki status Dewan Keamanan tetap di PBB, menjadi salah satu kunci utama dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Sebab Amerika Serikat memiliki hak veto yang dapat dikeluarkan setiap resolusi yang tidak sejalan dengannya dan membahayakan posisi Israel.

2.1 Gambaran Ringkas Sejarah Hubungan Amerika Serikat dan Israel

Hubungan Amerika Serikat dan Israel dimulai sejak kepemimpinan Presiden Amerika Serikat ke 33 yaitu Harry S. Truman. Masa jabatan yang dipegang Truman sebagai Presiden Amerika Serikat ialah 12-April-1945 sampai dengan 20-Januari-1953 (Krisnadi, 2011:525). Tepat pada akhir kepemimpinan Truman menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat diperiode pertama, tanggal 14 Mei 1948, Truman langsung mengakui Israel sebagai suatu negara. Presiden Amerika Serikat ke 33 tersebut langsung mengakui Israel sebagai suatu negara setelah 11 menit di deklarasikan. Dengan demikian Amerika Serikat merupakan negara pertama yang mengakui Israel sebagai negara secara resmi.



Gambar 2 David Ben Gurion saat Membacakan Deklarasi Kemerdekaan Israel pada tanggal 14 Mei 1948 di tel Aviv.

Sumber gambar : wikipedia melalui <https://www.viva.co.id/berita/dunia/772161-14-05-1948-negara-israel-resmi-berdiri>

Dukungan yang diberikan Presiden Harry Truman terhadap kemerdekaan Israel, tidak mendapatkan respon positif dari level domestik Amerika Serikat sendiri. Departemen luar negeri Amerika Serikat merasa kecewa atas tindakan Truman yang secara tiba-tiba memberikan pengakuan tersebut tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu (Isyafli 2012, 36). Departemen luar negeri saat itu dibawah komando Jendral Marshal menganggap bahwa kepedulian Amerika Serikat terhadap Israel era Presiden Truman merupakan bagian politik Truman untuk memperoleh suara dari orang Yahudi di negeri Paman Sam tersebut. Selain itu Richard Crossman yang merupakan anggota komite Anglo-Amerika dan Inggris mengatakan, bahwa isu tentang Israel digunakan sebagai bagian dari kampanye Presiden Truman guna mengambil simpati warga Yahudi di New York (Isyafli, 2012:37).

Meskipun terjadi pro dan kontra saat menyangkut keputusan Presiden mengenai kemerdekaan Israel, Truman pada tanggal 24 mei 1948 mengundang Presiden Israel yaitu Chain Weizmann ke Gedung Putih. Dalam pertemuan tersebut, Weizmann selaku presiden Israel memberitahukan bahwa Eliahu Epstein

diangkat menjadi duta besar Israel untuk Amerika Serikat. Pengangkatan duta besar yang ditawarkan Weizmann bertujuan agar perwakilan Amerika Serikat untuk Israel segera diresmikan. Tepat pada bulan Juni 1948, Amerika Serikat menunjuk James G. Mc.Donald sebagai duta besar Amerika Serikat untuk Israel.



Gambar 3 Pertemuan Presiden Amerika Serikat Harry Truman dan Presiden Pertama Israel, Chaim Weizman

Seiring berjalannya waktu, Timur Tengah tetap menjadi kawasan yang tidak dapat dilepaskan dari fokus utama dalam perumusan kebijakan serta politik luar negeri Amerika Serikat. Selain keputusan Truman yang dianggap mencolok, jika menyangkut Timur Tengah, negara Amerika Serikat tidak dapat berdiam diri. Selalu ada campur tangan Amerika dalam setiap konflik yang terjadi di Timur Tengah. Barack Obama yang merupakan Presiden Amerika ke 44, terkait politik luar negerinya juga lebih terfokus pada kawasan Timur Tengah, terutama jika menyangkut perdamaian antara Israel dan Palestina. Namun demikian, sikap Obama saat kepemimpinannya masih lebih berpihak pada Israel di periode pertama.

Sikap Obama yang lebih menitikberatkan pada keamanan Israel juga tidak terlepas dari status negara zionis tersebut yang merupakan sekutu Amerika Serikat. Posisi Israel yang menjadi sekutu Amerika Serikat membuat negara zionis tersebut memiliki posisi penting dalam pengambilan keputusan Amerika Serikat jika menyangkut Timur Tengah. Israel juga berkontribusi pada sistem

pemerintahan di Amerika Serikat seperti National Security Agency (NSC), bahkan kongres Amerika Serikat. Posisi yang diduduki Israel, tidak lepas dari adanya lobi-lobi Yahudi yang tersebar di Amerika Serikat seperti, American Israel Public Affairs Commite atau AIPAC.

2.2 Peran AIPAC dalam Hubungan Amerika Serikat dan Israel.

American Israel Public Affairs Committe atau AIPAC didirikan pada tahun 1951 yang merupakan salah satu lobi Yahudi di Amerika Serikat. AIPAC memiliki anggota kurang lebih 100.000 orang dan di sokong budget 65 juta dollar Amerika (AIPAC, 2017). Setiap lobi Yahudi selalu memiliki tujuan untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Penulis sebelumnya sudah menjelaskan bahwa kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah salah satunya ialah untuk mendukung eksistensi Israel.

Dukungan dukungan yang di dapatkan Israel dari Amerika Serikat tentu tidak lepas dari adanya campur tangan lobi Yahudi. Bentuk dukungan yang diberikan Amerika Serikat bisa berupa bantuan ekonomi, politik bahkan militer. Dalam hal ini, AIPAC merupakan salah satu lobi Yahudi yang sifatnya politis. AIPAC juga merupakan lobi Yahudi yang dapat menembus Kongres serta mempengaruhi undang undang Amerika Serikat (Herawati, 2015:164). Dengan demikian, AIPAC merupakan lobi yahudi yang bersifat formal.

AIPAC bisa dikatakan sebagai lobi pro-Israel yang paling dominan di Amerika Serikat. AIPAC juga sering terlibat dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah, terutama jika menyangkut Palestina. Untuk mencapai kepentingannya, AIPAC melakukan kerjasama dengan cara melobi Kongres AS serta pejabat elit yang ada di dalamnya. AIPAC juga dapat merancang undang-undang, suatu contoh yang pernah dilakukan oleh seorang Senator Lieberman yang juga ditandatangani oleh Senator Kyl, mengenai pemberian label pada garda revolusioner Iran atau Iranian Revolution Guards sebagai teroris dalam rangka melancarkan aksi Presiden Bush dalam melancarkan serangan. Hal tersebut kemudian di setuju sebanyak 80% oleh anggota Kongres (Petras, 2009:26). Lobi yang dilakukan AIPAC bersifat komunikasi yang sangat

intens dan aktif. Dengan adanya lobi yang dilakukan secara intens, AIPAC sering menghasilkan undang undang yang menekan berbagai pihak jika mengganggu kepentingan Israel di kawasan Timur Tengah.

Hubungan baik yang dilakukan AIPAC terhadap orang-orang yang berada di kursi pemerintahan dalam pengambilan keputusan, membuat para pelobi pro-Israel ini mudah untuk melakukan negosiasi. Selain itu, AIPAC juga dapat mempengaruhi kebijakan yang dijalankan Amerika Serikat melalui partai politik seperti partai Republik dan partai Demokrat. Kerjasama yang dilakukan oleh AIPAC terhadap kedua partai tersebut ialah untuk memastikan kepentingan Israel agar dapat tercapai serta terartikulasi dengan baik di tingkat parlemen Amerika.

Jaringan AIPAC tidak hanya berada di dalam kursi pemerintahan, namun juga di luar pemerintahan. Keberadaan media massa merupakan contoh dari alat propaganda AIPAC dalam membentuk opini publik. Namun demikian, untuk keputusan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat tetap berada di tangan Presiden dan Kongres. Oleh karena itu AIPAC selalu berusaha untuk melakukan lobi-lobi terhadap para pengambil keputusan di kursi pemerintahan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa segala kebijakan politik luar negeri yang telah dihasilkan eksekutif harus mendapatkan persetujuan dari badan legislatif supaya bisa di implementasikan (Berghiani, 2012:32).

Lobi yang dilakukan AIPAC terhadap para pemangku keputusan di Amerika Serikat pada intinya ialah untuk memenuhi kepentingan Israel di kawasan Timur Tengah. Untuk memenuhi kepentingan Israel, AIPAC selalu memberikan masukan dan mencoba mempengaruhi suara yang menguntungkan pihak para pelobi Israel di tingkat senat, parlemen, bahkan sampai ke tingkat Gedung Putih. Cara AIPAC melakukan lobi ke tingkat pemerintahan ialah diawali dengan cara menyokong dana kampanye bagi para politisi Amerika Serikat yang ingin duduk di kursi pemerintahan. Maka tidak heran apabila para pemangku kebijakan terutama kongres, mayoritas mengesahkan peraturan dan resolusi dibawah pengaruh AIPAC. Keberadaan orang Yahudi di kongres maupun senat

juga menjadi salah satu faktor keberhasilan lobi Pro-Israel untuk mencapai kepentingannya.

Keputusan politik luar negeri Amerika Serikat tergantung pada siapa yang memegang kursi kekuasaan. Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan politik luar negeri Amerika Serikat. Oleh karena itu AIPAC bahkan tidak ragu apabila memberi dukungan berupa suntikan dana saat kampanye terhadap calon-calon yang berpotensi duduk di kursi pemerintahan. Bahkan terdapat sebuah mitos yang beredar bahwa, siapapun yang mendukung Yahudi atau Israel, tentu akan memenangkan jabatan sebagai Presiden Amerika Serikat. Hal tersebut dapat dibuktikan dari kemenangan Barack Obama terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Kemenangan yang diraih Presiden Barack Obama, tentu tidak terlepas dari adanya campur tangan Yahudi. Sebab, dana kampanye yang diterima Barack Obama saat mencalonkan diri sebagai kandidat Presiden Amerika, ia mendapat sumbangan yang mayoritas dari kalangan orang-orang Yahudi, termasuk AIPAC.

2.3 Hubungan Amerika Serikat – Israel Era Presiden Barack Obama

Terpilihnya Obama yang merupakan kandidat dari partai demokrat sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2009, memunculkan harapan baru bagi dunia tentang perdamaian di Timur Tengah, terutama konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Kemenangan yang dicapai Barack Obama tidak hanya disambut suka cita oleh warga Amerika, akan tetapi masyarakat internasional turut antusias atas kemenangan tersebut. Obama resmi menjadi Presiden Amerika Serikat setelah mengalahkan John McCain yang merupakan calon kandidat dari partai Republik.

Kemenangan Barack Obama merupakan euforia hampir diseluruh negara, khususnya negara yang memiliki muslim mayoritas seperti Indonesia. Hal itu dikarenakan, Obama yang merupakan kaum minoritas di Amerika dan memiliki keturunan darah muslim Kenya diharapkan membawa perubahan yang lebih baik bagi dunia Internasional. Terpilihnya Obama sebagai Presiden juga diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat Internasional khususnya kaum

muslim terhadap Amerika Serikat. Sebab George W. Bush yang merupakan Presiden Amerika Serikat sebelum Barack Obama meninggalkan citra buruk terhadap kaum muslim.

Buruknya citra Amerika Serikat yang ditinggalkan di era Presiden George W. Bush salah satunya ialah dikarenakan kebijakan yang dinilai kontroversial jika menyangkut konflik di Timur Tengah. Salah satunya ialah pemberian label teroris yang diberikan oleh George W. Bush kepada Osama Bin Laden, yang kemudian berkembang menjadikan Islam dipandang sebagai kelomok teroris. Tuduhan tersebut mengakibatkan permusuhan dengan dunia muslim. Sikap George Bush yang keras terhadap Osama bin Laden juga semata mata untuk melindungi eksistensi Israel di kawasan Timur Tengah. Dengan demikian, Barack Obama yang memiliki latar belakang cukup baik diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap perdamaian di kawasan Timur Tengah khususnya, konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina.

Terpilihnya Barack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat membuka harapan baru bagi terselesaikannya konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Barack Obama dianggap memiliki arah politik luar negeri yang berbeda jika dibandingkan dengan George Bush. Akan tetapi, kemenangan Barack Obama tidak terlepas dari adanya campur tangan AIPAC yang merupakan lobi pro-Israel. Sumbangan kampanye yang di dapatkan Obama dari lobi Yahudi berjumlah sangat fantastis yaitu sekitar 147 juta dollar atau sekitar 47% dari total sumbangan yang didapat (Isyafli, 2012:92).

Dengan demikian, kemenangan Obama untuk menduduki kursi Presiden Amerika Serikat merupakan keberhasilan tim kampanyenya dalam mendekati lobi Yahudi terbesar di AS yaitu AIPAC. Penny Pritzker yang merupakan ketua penggalangan dana kampanye Obama berhasil meyakinkan AIPAC bahwa eksistensi Israel akan terlindungi apabila Barack Obama terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat (Tempo, 2012). Maka dari itu tidak menutup kemungkinan, bahwa setelah Obama menjabat sebagai Presiden, keberpihakan Amerika Serikat

dalam mendukung Israel tidak akan pernah berubah. Hal tersebut dibuktikan oleh pidato yang disampaikan oleh Barack Obama mengenai komitmen Amerika Serikat terhadap Israel saat berkunjung ke Kairo. Dalam pidatonya, Obama mengatakan :

“ Hamas memang memiliki dukungan dari sebagian bangsa Palestina, tetapi mereka juga harus mengakui bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk memainkan peran dalam memenuhi aspirasi bangsa Paletsina. Hamas harus berhenti menghentikan kekerasan, mengakui kesepakatan di masa lalu dan mengakui hak esistensi Israel (White House, 2009).

Keberpihakan Obama terhadap Israel sudah terlihat di awal kepemimpinannya melalui pidato yang ia lontarkan. Inti daripada pidato yang di ucapkan Barack Obama saat di Kairo ialah, berusaha untuk mempertahankan eksistensi Israel di kawasan Timur Tengah. Dengan demikian, harapan masyarakat internasional tidak memenuhi ekspektasi sebelumnya, dimana Obama akan memberikan peluang bagi Palestina untuk merdeka. Barack Obama sama saja seperti Presiden Amerika Serikat sebelumnya bahwa keamanan dan eksistensi Israel masih menjadi prioritas utama. Keberpihakan Amerika Serikat terhadap Israel saat kepemimpinan Barack Obama juga terlihat pada pidatonya yang lain. Hal tersebut terlihat saat Presiden Amerika Serikat melontaran pidatonya di Kementrian Luar negeri Amerika Serikat pada tanggal 21 Januari 2009. Presiden Barack Obama mengatakan :

“ Amerika berkomitmen pada Israel. dan kita akan selalu mendukung hak Israel untuk membela dirinya di hadapan ribuan ancaman yang nyata. Selama bertahun tahun, hamas telah menghancurkan ribuan roket kepada warga Israel yang tidak berdosa. Tidak ada demokrasi yang bisa menerima bahaya seerti ini bagi rakyatnya, tidak pula komunitas internasional, dan tidak pula rakyat Palestina sendiri, yang kepentingannya terabaikan karena aks teror. Sebagai pihak yang benar benar menghendaki perdamaian, kuartet (AS, Rusia, Uni Eropa, PBB) telah mengesahkan bahwa Hamas harus memenuhi syarat yang jelas yaini : akui hak eksistensi Israel, hentikan kekerasan dan patuhi perjanjian (antara israel-PLO/Otoritas – Palestina) yang telah dibuat di masa lalu (White House, 2009).

Dukungan yang diberikan Barack Obama terhadap Israel juga dibuktikan oleh sikap Barack Obama yang memberikan ancaman Veto mengenai

kemerdekaan serta pengajuan negara Palestina sebagai anggota tetap di PBB (CNN, 2011). Ancaman yang dilayangkan Obama tentu semakin meyakinkan publik adanya komitmen Amerika Serikat tetap mendukung eksistensi Israel di kawasan Timur Tengah. Ancaman yang diberikan Amerika Serikat terkait status Palestina sebagai anggota di PBB justru berbanding terbalik dengan slogan kampanye Barack Obama yang menyatakan “Change, yes we can believe in”. (Isyafli, 2012 : 88).



Gambar 4 Barack Obama melakukan kampanyenya yang bertema “Change We Can Believe In.

Sumber Gambar https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&biw=1366&bih=654&tbm=isch&sa=1&ei=zyfhWpirCMzXvAT4yY64CA&q=Barack+Obama++%E2%80%9CChange+We+Can+Believe+In&oq=Barack+Obama++%E2%80%9CChange+We+Can+Believe+In&gs_l=psy-ab.3...8382.8382.0.8746.1.1.0.0.0.0.0.0....0...1c..64.psy-ab..1.0.0....0.Y_xmihT_MI#imgcr=mbewHTZD52r5gM:

Kampanye Barack Obama tersebut juga berjanji bahwa membuka lembaran yang baru berkaitan hubungan Amerika Serikat dengan kaum muslim, dan akan mengusahakan kemerdekaan Palestina di era kepemimpinannya. Namun pada kenyataannya sikap Barack Obama yang mengancam dengan cara memberikan veto terhadap Palestina semakin terlihat bahwa Israel masih menjadi prioritas utama bagi Amerika Serikat siapapun presidennya.

Amerika Serikat dalam mempertahankan eksistensi Israel dapat dibuktikan dengan adanya sikap Presiden Barack Obama memberikan ancaman veto terhadap Palestina. Ancaman veto yang diberikan Obama terjadi pada tanggal 22

September 2011 saat menemui Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Washington. Adapun alasan Obama dalam memberikan ancaman veto ialah, pendirian Palestina harus melalui jalur perundingan serta negosiasi dengan negara Israel. Barack Obama berpendapat bahwa resolusi dan pernyataan PBB tidak akan menyelesaikan konflik yang telah berlangsung lama antara Israel dan Palestina (Isyafli, 2012:106). Sikap Amerika Serikat yang demikian tentu tidak terlepas dari keberhasilan yang diraih oleh para pelobi Israel terhadap pemangku kebijakan.

Sikap yang dilakukan Barack Obama tentu sangat berbeda jika dibandingkan saat masa kampanye dan awal kepemimpinannya terkait konflik Israel dan Palestina. Awal pemerintahan Presiden Barack Obama jika menyangkut konflik kedua negara tersebut terlihat lebih condong ke Palestina. Keberpihakan Obama terhadap Palestina didasari dengan adanya niat baik Obama menjadikan proses perbicaraan damai sebagai kebijakan utamanya saat itu. Selain proses perundingan damai, Barack Obama juga sempat mengutuk dengan keras upaya pembangunan permukiman yang dilakukan Israel di atas tanah Palestina (Nytimes, 2009)..

Pengutukan yang dilakukan Barack Obama terhadap Israel ialah mengenai permukiman baru yang ilegal di atas tanah milik Palestina. Permukiman tersebut ialah pembangunan yang dilakukan di Ramat Solomo pada bulan april tahun 2010, sebanyak 1600 rumah didirikan (Kompas, 2011). Barack Obama dalam sikap pengutukan kerasnya juga mengatakan bahwa proses damai antara Israel dan Palestina tidak akan mencapai final apabila pembangunan permukiman Yahudi di tanah Palestina tetap dilanjutkan serta adanya reaksi emosional dari dunia internasional. Selain itu Obama juga berpendapat bahwa solusi kedua negara akan tercapai apabila Israel berhenti melakukan pembangunan permukiman. Hal tersebut didasari oleh sikap dari pihak Palestina yang memberikan syarat utama perdamaian dengan berhenti melakukan pembangunan permukiman di kawasan Palestina, dan Obama meminta Israel untuk menghentikannya (Nytimes, 2009).

Proses damai yang ditawarkan Presiden Barack Obama dalam upaya menangani konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina ialah dengan cara mempertemukan presiden Palestina yaitu Mahmoud Abbas dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada pertengahan tahun 2009 (Kompas, 2009). Selain proses damai, pengutukan terhadap Israel atas pembangunan permukiman di kawasan Palestina juga pernah diutarakan Obama. Pada bulan Mei 2011, Obama berkesempatan untuk menemui PM Benjamin Netanyahu. Pada kesempatan tersebut Barack Obama mengatakan bahwa Israel harus kembali ke batas-batas sebelum perang 1967 dimana itu merupakan batas akhir bagi kedua negara (Nytimes, 2009).



Gambar 5 PM Benjamin Netanyahu, Presiden AS Barack Obama dan Presiden Palestina President Mahmoud Abbas selama pertemuan trilateral di New York, AS, 22 September 2009

Sumber :

<http://internasional.kompas.com/read/2017/01/17/16400051/palestina.tetapkan.2017.pengakhiran.pendudukan.israel>

Pernyataan Barack Obama yang demikian mendapatkan kritikan dari sekutunya terutama dari kalangan lobi Yahudi yang berada di Amerika Serikat. Seperti yang telah penulis utarakan sebelumnya, bahwa keberadaan lobi Yahudi di Amerika Serikat sangatlah kuat untuk mempengaruhi kebijakan. Lobi yang dimaksud adalah AIPAC yang merupakan komuitas lobi Yahudi terbesar di Amerika Serikat. Dampak daripada kritikan yang dilontarkan AIPAC, pada akhirnya Barack Obama memberikan klarifikasi bahwa pernyataannya tersebut

sebatas langkah negosiasi di kemudian hari bagi Israel dan Palestina. Dengan demikian, kritikan yang dilontarkan para pelobi Yahudi di AS, mengakibatkan Obama berubah haluan untuk memberikan ancaman veto terhadap Palestina pada bulan September 2011. Hal tersebut membuktikan, bahwa keberadaan pelobi Yahudi di Amerika Serikat sangatlah kuat dalam pengambilan keputusan politik luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah.

Keputusan Politik Luar Negeri Amerika Serikat jika menyangkut konflik Israel dan Palestina pasti tidak terlepas dari campur tangan para pelobi Yahudi, khususnya AIPAC. Penulis melihat adanya perbedaan sikap antara masa kampanye Barack Obama dan setelah menjabat sebagai Presiden. Hal tersebut pasti karena adanya tekanan dari AIPAC dan Kongres. Sikap Obama tersebut menghancurkan ekspektasi dunia Internasional terhadap Obama khususnya bagi bangsa Palestina akan adanya perdamaian. Adapun sikap Barack Obama yang akhirnya memberikan ancaman veto sehingga menggagalkan berdirinya negara Palestina menyebabkan pembangunan permukiman Yahudi di kawasan Timur Tengah semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga semakin sempit status kawasan Palestina. Hal tersebut dapat dilihat dari data dibawah ini :

Data diatas menyebutkan bahwa terjadi peningkatan perpindahan penduduk Israel ke kawasan Palestina di setiap tahunnya. Tercatat, sejak tahun 1977 bermula dari 4.400 jiwa dari adanya pembangunan permukiman, sampai pada tahun 2015 mencapai 385.900 jiwa. Selama 38 tahun terjadi peningkatan yang cukup pesat bagi pertumbuhan penduduk dikawasan Palestina akibat adanya pembangunan permukiman tersebut. Nickolay Mladenov yang merupakan kordinator khusus PBB untuk proses perdamaian di Timur Tengah juga mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB dalam laporan pertamanya, sejak resolusi yang mengancam permukiman Yahudi dikeluarkan Desember, bahwa ada kecenderungan besar untuk melanjutkan penyebaran permukiman Yahudi. Hingga tahun 2017, ia juga mengatakan bahwa ada sekitar 430 ribu warga Israel yang tinggal di Tepi Barat dan 200 ribu lainnya di Yerusalem Timur. Kedua wilayah itu nantinya akan dijadikan sebagai wilayah Palestina merdeka (DW, 2017).

Tabel 1 Data Jumlah Pemukim Yahudi di Kawasan Palestina (diluar kawasan Yerusalem Timur) pada tahun 2009 s/d 2017

No	Tahun	Jumlah Pemukim
1	2009	296,700
2	2010	311.100
3	2011	325.500
4	2012	341.400
5	2013	356.500
6	2014	370.700
7	2015	385.900
8	2016	399.300
9	2017	430.000

Sumber : <http://peacenow.org/>

Dengan demikian, Hubungan Amerika Serikat dan Israel di Era Barack Obama bisa terbilang cukup baik di periode pertama meskipun terjadi sedikit perselisihan. Amerika Serikat di era Barack Obama secara konsisten masih menjaga eksistensi Israel di Kawasan Timur Tengah. Hal tersebut terlihat dengan tidak adanya tindakan tegas dari Amerika Serikat terhadap Israel atas sikap arogansinya yang terus mendirikan permukiman Yahudi di kawasan Palestina. Dari data yang diambil dari PeaceNow diatas juga membuktikan bahwa permukiman Yahudi di kawasan Palestina terus meningkat.

Selain terjadi peningkatan jumlah wilayah permukiman Israel dikawasan Palestina, ternyata Amerika Serikat juga mengalami peningkatan dukungan terhadap Israel dalam bentuk bantuan dana militer era Barack Obama. Pada tahun 2016, sebelum berakhirnya masa pemerintahan Barack Obama, AS memberikan bantuan terbesarnya kepada Israel selama 10 tahun sejumlah \$ 38 miliar (Nytimes, 2016). Bantuan ini merupakan, bantuan terbesar yang diberikan Amerika terhadap Israel dan paling banyak jika dibandingkan bantuan AS terhadap negara lain. Bantuan yang diberikan AS terhadap Israel merupakan salah satu bentuk komitmen untuk menjaga keamanan Israel. Sebelumnya, Amerika Serikat memberikan bantuan sebesar \$ 3,1 miliar per tahun selama 10 tahun yang

akan berakhir pada tahun 2018. Namun, pada tahun 2016, kongres telah menambahkan 500 juta dollar per tahun untuk pertahanan rudal Israel (Nytimes, 2016).



Gambar 6 Pertemuan Barack Obama bertemu dengan Menteri Benjamin Netanyahu di Oval Office pada tahun 2016, membahas komitmen AS terhadap keamanan Israel.

Sumber : The New York Times, melalui

<https://www.nytimes.com/2016/09/14/world/middleeast/israel-benjamin-netanyahu-military-aid.html>

Bantuan yang di terima Israel sejumlah 3,8 miliar dollar kurang lebihnya 500 triliun rupiah merupakan sikap komitmen Amerika Serikat dalam mendukung sekutunya. Sebelumnya, bantuan yang diberikan Amerika Serikat terhadap Israel berjumlah \$ 3,1 miliar per tahunnya. Mengamankan Israel dari ancaman serta menjaga eksistensi Israel dikawasan Timur Tengah merupakan komitmen Amerika Serikat yang tidak dapat diganggu gugat. Denies Ross yang merupakan mantan penasehat Timur Tengah untk Presiden Barack Obama mengatakan bahwa bantuan yang diberikan kepada Israel ialah tak lain untuk melakukan pendekatan oleh orang Amerika terhadap Israel yang sikap nya Bipartisan (Nytimes, 2016). Selain itu, Susan E. Rice yang merupakan penasehat keamanan nasional Obama, mengatakan bahwa bantuan militer yang diberikan AS terhadap Israel selama 10 tahun sejumlah 3,8 miliar dollar ialah sejarah bantuan militer terbesar AS untuk negara manapun (Nytimes, 2016).

Bantuan yang diberikan Amerika Serikat terhadap Israel senilai \$ 3.8 miliar atau setara dengan 500 triliun rupiah ditandatangani pada tanggal 14 September 2016. Perjanjian tersebut menggantikan paket bantuan yang diberikan AS terhadap Israel sebelumnya yang akan berakhir pada tahun 2018. Paket bantuan yang diberikan AS terhadap Israel bisa dikatakan merupakan wujud frustrasi pemerintahan Barack Obama atas pembangunan permukiman Israel di kawasan Palestina (BBC, 2016). Bahkan, Kementerian Luar negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan komitmen tunggal terbesar untuk bantuan militer terhadap Israel dalam sejarah AS (CNN, 2016).

Sikap yang ditunjukkan Presiden Barack Obama bisa saja menunjukkan dukungannya terhadap keamanan Israel untuk melawan opini mengenai pemerintahannya yang dianggap tak sepenuhnya mendukung sekutu AS di Timur Tengah. Hal tersebut didasari oleh, hubungan antara Barack Obama dan Benjamin Netanyahu yang dianggap mengalami keregangan sejak maret 2015 (bisa dilihat pada gambar 2.7), ketika PM Israel muncul dihadapan kongres untuk meminta kongres menentang kesepakatan AS dengan Iran yang telah diusahakan oleh Barack Obama. Selain itu, permukiman Israel di tepi barat dan timur Yerusalem juga merupakan penyebab hubungan dingin Amerika Serikat dan Israel.



Gambar 7 Aksi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat muncul dihadapan Kongres untuk melobi Kongres AS agar menentang kesepakatan AS – Iran.

Sumber Gambar : AFP, yang diambil dari

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/09/160914_dunia_rekor_bantuan_as_israel

Pada bulan Agustus 2016, Gedung Putih sempat mengecam negara Israel yang merupakan sekutu Amerika Serikat terkait pembangunan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki Israel mengalami percepatan. Selain itu pihak Washington juga mengatakan kepada Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu bahwa kebijakan Netanyahu dan kekerasan Palestina akan menghambat proses tercapainya kesepakatan damai (BBC, 2016). Hal inilah yang membuat hubungan kedua politisi yaitu Obama dan Netanyahu mengalami ketegangan. Maka bisa dikatakan bahwa, sikap AS yang memberikan bantuan terhadap Israel dalam jumlah besar merupakan bentuk memperbaiki hubungan antara Amerika dan Israel di akhir kepemimpinan Barack Obama yang akan berakhir pada Januari 2017.

Bantuan yang diberikan Amerika Serikat terhadap Israel senilai \$ 3.8 miliar merupakan cara Barack Obama untuk memperbaiki hubungan AS – Israel di akhir pemerintahannya. Namun demikian, Amerika Serikat di penghujung tahun, tepatnya tanggal 23 Desember 2016 membuat keputusan yang mengejutkan bagi dunia internasional. Pasalnya, pada tanggal 23 Desember 2016 Amerika Serikat menyatakan Abstain terhadap Resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB nomor 2334. Adapun inti daripada resolusi tersebut ialah mengenai penghentian permukiman yahudi dikawasan Palestina yang dinilai tidak sah dan melanggar hukum internasional. Sebelumnya, Barack Obama sempat mengkritik Benyamin Netanyahu yang dianggap merusak perundingan damai karena terus membangun permukiman dan melakukan kekerasan terhadap palestina.

Sikap Amerika Serikat yang Abstain terhadap resolusi 2334 ini menimbulkan berbagai spekulasi. Sebab sikap yang lontarkan Amerika Serikat terhadap resolusi tersebut sangat berbanding terbalik dengan pemberian bantuan dana militer terhadap Israel. Sikap Amerika Serikat yang secara tiba-tiba memberikan suntikan dana besar terhadap Israel lalu abstain terhadap resolusi 2334 merupakan hal yang sangat bertolak belakang dengan kebijakan AS selama ini. Pasalnya, Amerika Serikat selalu berkomitmen dalam menjaga eksistensi

Israel di kawasan Timur Tengah, terutama jika menyangkut masalah Palestina. Keputusan abstain yang dilayangkan AS terhadap resolusi 2334 ini dinilai sangat tepat bagi penulis, sebab terjadi dalam waktu satu bulan sebelum Obama resmi mengakhiri jabatannya pada 20 Januari 2017.

Menurut data yang telah dirangkum, terdapat dua sikap Obama cenderung berubah haluan terhadap Israel saat menjabat sebagai Presiden. Pertama, adanya campur tangan orang-orang AIPAC dalam memenangkan Barack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat. Oleh karena itu, ada beban tersendiri bagi Obama untuk mengambil tindakan tegas terhadap Israel. Kedua, Barack Obama serius untuk menangani konflik Israel-Palestina akan tetapi mencari waktu yang tepat untuk menangani konflik Israel – Palestina secara serius. Oleh sebab itu, Barack Obama mengambil langkah strategis dalam menyelamatkan Palestina dari masifnya pembangunan permukiman yang dilakukan Israel, dengan cara abstain terhadap Resolusi yang dikeluarkan DK PBB nomor 2334 yang diselenggarakan pada tanggal 23 Desember 2016. Dengan demikian Hubungan antara AS dan Israel mengalami fluktuatif era Presiden Barack Obama.

Dengan demikian, Hubungan Amerika Serikat dan Israel di Era Barack Obama mengalami pasang surut, berdasarkan tiga titik utama. Pertama, pada tahun 2011, Barack Obama memberikan ancaman veto atas pengakuan Palestina sebagai sebuah negara dan masuk dalam anggota PBB. Kedua, pada tahun 2015 terjadi ketegangan antara Amerika Serikat dan Israel mengenai isu nuklir Iran. Ketiga, merupakan puncak dari Hubungan AS dan Israel Era Barack Obama, yaitu keputusan Abstain yang dilayangkan AS terhadap resolusi DK PBB nomor 2334. Sehingga di akhir kepemimpinan Barack Obama, Amerika dan Israel mengalami puncak ketegangan. Resolusi tersebut tak lain menyangkut pembangunan permukiman Israel di kawasan Palestina. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menjabarkan isi resolusi 2334 akan dijelaskan di Bab III.

BAB 3 SIKAP AMERIKA SERIKAT TERHADAP RESOLUSI PBB TERKAIT KONFLIK ISRAEL DAN PALESTINA

Bab III, akan menjelaskan secara singkat mengenai sikap Amerika Serikat terhadap konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Terdapat tiga pembahasan utama yang akan penulis jabarkan pada bab ini. Pertama, akan menjelaskan Sikap Amerika Serikat terhadap konflik Israel dan Palestina secara umum. Kedua, pada bab ini akan dibahas mengenai sikap yang ditunjukkan Amerika Serikat terkait konflik Israel dan Palestina era Presiden Barack Obama. Ketiga, membahas mengenai sikap Amerika Serikat terhadap resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB nomor 2334, yang merupakan pembahasan inti dari bab III. Adapun penjelasan yang dijabarkan oleh penulis pada bab III, menjadi acuan penulis untuk menjawab rumusan masalah pada bab IV.

3.1 Sikap Amerika Serikat terhadap Konflik Israel dan Palestina.

Negara Superpower seperti Amerika Serikat mempunyai pengaruh besar dalam konstelasi politik internasional. Pengaruh yang diberikan Amerika Serikat terhadap percaturan politik internasional dikarenakan negara tersebut memiliki kekuatan di bidang ekonomi dan militer. Keputusan politik yang dihasilkan Amerika Serikat sedikit banyak bisa berdampak pada Negara lain. Suatu contoh Kawasan Timur Tengah yang menjadi titik utama Amerika Serikat dalam memutuskan kebijakannya. Sikap ikut campur Amerika terhadap setiap konflik yang terjadi di Timur Tengah tentu akan menjadi sorotan bagi dunia internasional, khususnya jika menyangkut konflik Israel dan Palestina.

Keputusan kebijakan politik luar negeri di dalam konstitusi AS berada di tangan Presiden dan Kongres. Sebuah kebijakan yang dihasilkan oleh eksekutif harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu di tingkat legislatif. Dalam hal ini, Presiden merupakan badan eksekutif sedangkan Kongres merupakan badan legislatifnya. Untuk menghasilkan suatu kebijakan di AS harus melalui proses sistem politik di dalamnya. Disetiap proses pengambilan keputusan akan dipengaruhi oleh dua elemen yaitu internal dan eksternal. Elemen internal meliputi ; individu, birokrasi, interest group, dan sistem nasional yang ada.

Sedangkan pada elemen eksternal dapat berupa sistem global yang menaungi hubungan antar negara seperti Dewan Keamanan PBB.

Interest Group memiliki peran yang cukup besar dalam pengambilan keputusan serta kebijakan luar negeri Amerika Serikat. AIPAC merupakan elemen internal yang tergolong dalam interest group yang memiliki pengaruh cukup besar didalam proses pengambilan keputusan AS terhadap kawasan Timur tengah, khususnya jika menyangkut konflik Israel dan Palestina. AIPAC merupakan sekumpulan orang-orang Yahudi yang pro terhadap Israel untuk menekan AS agar selalu mengikuti keinginannya dalam mengamankan eksistensinya di kawasan Timur Tengah. Kemampuan AIPAC dalam memengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur tengah sudah tidak dapat diragukan lagi. Komitmen AS dalam mengamankan posisi Israel dapat dilihat melalui beberapa kebijakan atau keputusan yang dapat menguntungkan Israel. Hal tersebut dapat dilihat melalui tabel dibawah ini.

Tabel 2 Sikap Amerika Serikat terhadap Konflik Israel dan Palestina

No	Presiden	Tanggal	Sikap AS terhadap Konflik Israel dan palestina
1	Woodrow Wilson F.D Roosevelt	11 Mei 1942	Dukungan Roosevelt terhadap deklarasi Baltimore untuk merubah Palestina menjadi negara Yahudi
2	Harry Truman	15 Mei 1948	Amerika Serikat Era Harry Truman mengakui Kemerdekaan Israel setelah di Proklamirkan.
3	Jimmy Carter	17 September 1978	Jimmy carter menjadi mediator dalam perjanjian Camp David antara Israel dan Mesir., yang berdampak dukungan mesir terhadap Palestina mengalami penurunan drastis.
4	George Bush Sr	17 Januari 1991	Amerika Serikat menyerang Irak, yng dianggap mengancam keamanan Israel. hal tersebut

			dikarenakan Saddam Husain adalah mendukung perjuangan Palestina dari kependudukan yang dilakukan Israel
5	Barack Obama	27 April 2011	Rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah yang sangat ditentang oleh AS, menyebabkan AS menghentikan bantuan ekonominya ke Palestina.
		11 November 2011	Palestina gagal mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari PBB, setelah ancaman Veto yang diberikan AS mengenai rencana DK PBB mengakui kemerdekaan Palestina.
		23 Desember 2016	Amerika Serikat Abstain terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2334 mengenai penghentian kependudukan Israel di kawasan Palestina

Data diambil dari berbagai sumber

Selama ini, AIPAC telah membantu Israel dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri AS terhadap negaranya. Salah satunya yang paling baru adalah di tahun 2011 dan 2016. Pada tahun 2011, berkat lobi AIPAC, Palestina gagal mendapat pengakuan sebagai negara oleh PBB karena ancaman veto yang diberikan Amerika Serikat. Sedangkan di tahun 2016, Israel berhasil mendapatkan bantuan dana militer terbesar sepanjang sejarah yaitu sebesar \$ 3.8 miliar. Dana bantuan AS terhadap Israel merupakan bantuan terbesar satu satunya yang pernah diberikan negara adidaya tersebut terhadap sekutunya maupun negara lain. Namun demikian, di penghujung tahun 2016 tepat di akhir pemerintahan Barack Obama, AIPAC dinilai gagal dalam melakukan lobinya terkait Palestina. Sebab pada

tanggal 23 Desember 2016, Amerika Serikat resmi melayangkan sikap Abstain terhadap resolusi yang dikeluarkan Dewan keamanan PBB nomor 2334. Adapun inti dari resolusi tersebut ialah mengenai penghentian segala aktivitas Permukiman yang dilakukan Israel di atas tanah Palestina.

Sejarah permukiman Yahudi yang dibangun Israel di kawasan Palestina berawal dari perang enam hari. Pada tahun 1967, Israel melalui perang 6 hari berhasil menaklukkan Tepi barat termasuk Yerusalem Timur yang meliputi Yordania, dataran tinggi golan, semenanjung sinai, dan juga jalur Gaza (Peacenow, tanpa tahun). Sejak dimulainya pembangunan permukiman, banyak pejabat negara Israel yang membela bahwa permukiman tersebut merupakan kepentingan bagi keamanan Israel. bahkan pada tahun 1967, menteri pertahanan Yigal Allon mengumumkan. Pembangunan permukiman tak lain ialah dilakukan oleh pemerintah Israel yang secara langsung dan tidak langsung membiayai serta mensubsidi permukiman. Akhirnya hal tersebut memicu debat dan kontroversi di masyarakat internasional. Selain itu, permukiman yang dibangun oleh Israel mendapatkan suntikan dana dari luar, seperti organisasi nirlaba yang menggalang dana di Amerika Serikat (Peacenow, tanpa tahun). Namun pada akhir tahun 2016, Amerika Serikat memberikan keputusan yang mengejutkan yaitu abstain terhadap resolusi DK PBB nomor 2334.

Abstainnya Amerika Serikat terhadap resolusi tersebut mematahkan komitmen Amerika Serikat dalam menjaga eksistensi Israel di kawasan Timur Tengah Era Barack Obama. Oleh karena itu, sikap abstain yang dilayangkan Amerika Serikat berdampak pada penghancuran permukiman Yahudi di kawasan Palestina. Sebelumnya, sikap Amerika Serikat jika menyangkut konflik Israel dan Palestina selalu membela Israel demi menjaga keamanan sekutunya di kawasan Timur Tengah.



Gambar 8 Situasi anggota PBB saat melakukan pemungutan suara terhadap resolusi 2334 pada tanggal 23 Desember 2016 di Markas besar PBB di New York.

Sumber gambar diambil dari UN melalui

<http://internasional.metrotvnews.com/read/2016/12/24/632989/indonesia-resolusi-pbb-tegaskan-pemukiman-israel-di-palestina-ilegal>

Resolusi PBB nomor 2334 yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan pada tanggal 23 Desember 2016 merupakan usulan dari beberapa negara yaitu Selandia Baru, Malaysia, Sinegal, dan Venezuela (CNN, 2016). Pemungutan suara yang dilakukan di markas besar PBB di New York terkait resolusi 2334 ialah dikarenakan sebagian masyarakat internasional, khususnya PBB serta Mahkamah Internasional menyatakan bahwa Permukiman Yahudi termasuk ilegal (BBC, 2016). Landasan utamanya adalah sebuah Konvensi Jenewa ke-4 pada tahun 1949 yang melarang transfer otorita yang menduduki lahan kepada mereka terkait lahan yang sedang di duduki (BBC, 2016). Akan tetapi negara Israel menyatakan bahwa Konvensi ke-4 Jenewa tidak mengacu langsung terhadap wilayah tepi barat dikarenakan kawasan tersebut secara teknis tidak di dudukinya (BBC, 2016).

Palestina sebagai kawasan yang menjadi korban permukiman menyatakan bahwa pembangunan permukiman Yerusalem timur mengalami kesulitan dalam mengatur wilayah perbatasan. Oleh sebab itu, Palestina menuntut Israel untuk membekukan segala aktivitas sebagai suatu syarat tercapainya perundingan damai (BBC, 2016). Akan tetapi Israel justru menyatakan bahwa Palestina hanya menggunakan alasan permukiman sebagai dasar untuk menghindari jalur

perundingan secara langsung. Israel juga menyatakan bahwa permukiman bukanlah suatu hambatan dalam proses perundingan damai (BBC, 2016).

3.2 Isi Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2334

Pemungutan resolusi nomor 2334 diadakan pada 23 Desember 2016 di markas besar PBB bermula atas tuntutan yang dilakukan oleh beberapa negara yaitu, Venezuela, Sinegal, Selandia Baru, dan Malaysia (BBC, 2016). Resolusi nomor 2334 ini disetujui pada pertemuannya yang ke 7853, pada tanggal 23 Desember 2016. Resolusi nomor 2334 bertujuan untuk memperkuat resolusi yang relevan, termasuk didalamnya resolusi 242 (1967), 338 (1973), 446 (1979), 452 (1979), 465 (1980), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003), dan 1850 (2008).

Resolusi nomor 2334 disusun berdasarkan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta mempertegas, *inter alia*, ketidakabsahan pendudukan suatu kawasan dengan kekuatan senjata. Selain itu resolusi ini juga menegaskan kewajiban Israel, sebagai pihak yang menduduki, untuk menepati secara hati hati dengan pertanggungjawaban dan kewajiban legalnya dibawah Konvensi Jenewa yang ke-empat yakni, terkait dengan Perlindungan Orang-orang Sipil saat peperangan, pada tanggal 12 agustus 1949, dan mengingat kembali petunjuk petunjuk yang ditetapkan pada 9 juli 2004 oleh Mahkamah Internasional.

Resolusi nomor 2334 mengutuk segala bentuk tindakan dengan tujuan mengubah susunan, karakter, dan status kependudukan Teritori Bangsa Palestina yang diduduki sejak tahun 1967, termasuk Yerusalem Timur, termasuk, *inter alia*, konstruksi dan perluasan perkampungan, peralihan hunian Bangsa Israel, pengambil alihan tanah, penghancuran rumah dan pemindahan masyarakat sipil Bangsa Palestina, yang dianggap sebagai pelanggaran hukum kemanusiaan internasional dan resolusi terkait. Selain itu di dalam resolusi tersebut juga menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam bahwa kegiatan perluasan hunian bangsa Israel sangat membahayakan keberlangsungan hidup penyelesaian dua Negara berdasarkan kesepakatan 1967. Mengingat kembali kewajiban berdasarkan Quartet Roadmap, yang disahkan oleh resolusi 1515 (2003), tentang

penghentian oleh Bangsa Israel terhadap segala bentuk aktivitas pendudukan, termasuk “pertumbuhan alami”, serta pembongkaran seluruh hunian pos terdepan yang didirikan sejak Maret 2001.

Isi Resolusi 2234, Mengingat kembali tentang kewajiban berdasarkan Quartet Roadmap bagi Pasukan Keamanan Wilayah Bangsa Palestina untuk melaksanakan operasi yang efektif dalam melawan siapa saja yang berhubungan dengan ancaman dan pembongkaran terhadap potensi teroris, termasuk penyitaan terhadap senjata ilegal. Resolusi 223 bertujuan mengutuk segala aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil, termasuk aksi teror, begitu juga tindakan provokasi, penghasutan, dan pengrusakan. Resolusi ini menyatakan kembali pandangannya terhadap suatu kawasan dimana dua negara demokrasi, Israel dan Palestina, hidup berdampingan dengan damai dalam wilayah perbatasan yang aman dan terkendali (United Nations, 2016).

Resolusi yang dikeluarkan Dewan keamanan PBB nomor 2334 menekankan bahwa status quo tidaklah berlaku secara terus menerus dan bahwa langkah-langkah penting, yang konsisten dengan suatu transisi yang diakibatkan oleh persetujuan persetujuan utama, sangatlah diperlukan untuk (i) menstabilkan situasi serta membalik kecenderungan kecenderungan negatif di daerah, yang terus menerus mengikis penyelesaian dua negara dan, dan (ii) menciptakan kondisi untuk memperoleh negosiasi akhir yang sukses dan untuk menyempurnakan penyelesaian dua negara melalui negosiasi-negosiasi tersebut dan yang ada di daerah (United Nations, 2016).

Resolusi nomor 2334 menegaskan bahwa penetapan oleh israel tentang pendudukan di wilayah bangsa Palestina yang dilakukan sejak 1967, termasuk Yerusalem Timur, tidak memiliki validitas legal dan menyebabkan suatu kesalahan mencolok berdasarkan hukum internasional dan suatu penghalang utama dalam pencapaian penyelesaian dua negara yakni mengakhiri konflik dan pencapaian perdamaian yang sempurna. Selain itu di dalam resolusi 2334 menyatakan kembali suatu tawaran bahwa Israel secara sungguh-sungguh akan mengakhiri seluruh aktivitas pendudukan pada wilayah yang di duduki bangsa

Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan akan benar benar menghormati kewajiban kewajiban legal.

Resolusi 2334 menggarisbawahi bahwa hal tersebut tidak akan menjadikan perubahan perubahan pada kesepakatan kesepakatan 4 juni 1967, termasuk di dalamnya Yerusalem, lain daripada itu akan disepakati oleh pihak pihak melalui negosiasi negosiasi. Selain itu, *menekankan* bahwa seluruh aktivitas pendudukan Israel sangat penting untuk memperbaiki penyelesaian dua negara, dan akan menciptakan langkah-langkah tegas yang bisa diambil untuk membalikkan kecenderungan kecenderungan negatif dikawasan negatif di kawasan yang membahayakan penyelesaian dua negara.

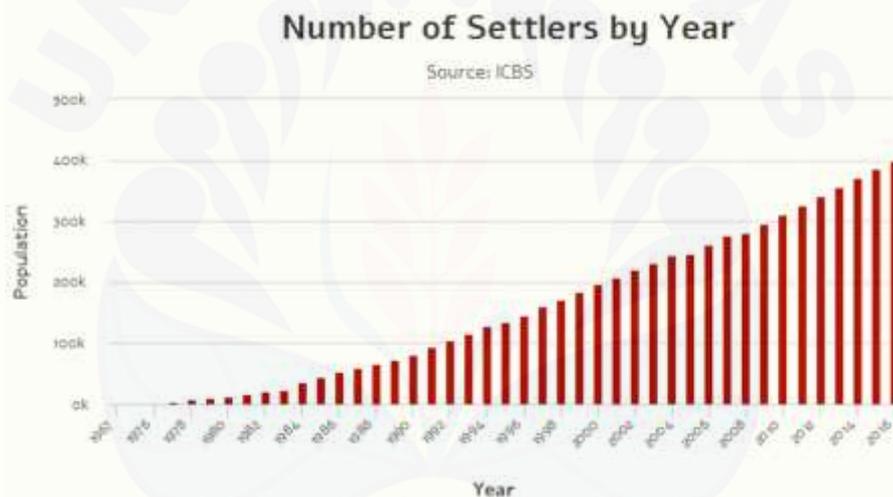
Resolusi 2234 juga menyerukan seluruh negara, untuk membedakan, terkait dengan hal hal yang relevan antara wilayah negara israel dan wilayah wilayah yang diduduki sejak 1967. Adapun seruan-seruan yang dilontarkan di dalam rResolusi DK PBB nomor 2234 ialah ialah sebagai berikut ;

1. *Menyerukan* dilakukannya langkah-langkah tepat untuk mencegah berbagai tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil, termasuk aksi teror, juga berbagai tindakan provokasi dan pengerusakan, menyerukan adanya pertanggung-jawaban terkait hal tersebut, dan menyerukan dipenuhinya kewajiban kewajiban atas hukum internasional untuk memperkuat usaha-usaha yang sedang berlangsung dalam memerangi terorisme, termasuk kondisi keamanan, dan mempertegas, pengutkan terhadap semua tindakan terorisme.
2. *Menyerukan kepada* kedua kelompok untuk melakukan tindakan berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan internasional, serta kesepakatan-kesepakatan dan kewajiban-kewajiban mereka sebelumnya, untuk menjaga keadaan tenang dan terkendali, serta untuk menjaga diri dari tindakan-tindakan provokasi, retorika yang berkobar-kobar dan menghasut, dengan tujuan, *inter alia*, semakin mempersempit lingkup masalah di kawasan, memulihkan kepercayaan dan rasa percaya diri, menunjukkan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan sebagai komitmen yang tulus untuk penyelesaian

masalah kedua Negara, serta menciptakan keadaan-keadaan yang penting untuk mempromosikan kedamaian;

3. *Menyerukan* kepada kedua negara untuk melanjutkan, dalam rangka kebutuhan mempromosikan kedamaian dan keamanan, mempercepat usaha bersama mewujudkan negoisasi-negoisasi yang kredibel seputar isu-isu proses perdamaian di Timur Tengah dalam kerangka waktu sebagaimana ditentukan oleh Quartet dalam pernyataannya tertanggal 20 September 2010;
4. *Turut mendesak* terhadap intensifikasi dan percepatan usaha-usaha serta dukungan diplomatik baik regional maupun internasional dengan tujuan pencapaian, tanpa penundaan berarti, kecuali terwujudnya perdamaian di Timur Tengah berdasar pada resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, ketentuan-ketentuan Madrid, termasuk ketentuan pokok kawasan untuk perdamaian, Inisiatif Perdamaian Arab serta Peta Jalan Quartet yang berakhir pada pendudukan Israel yang dimulai sejak 1967; dan menekankan dalam hal ini pentingnya keberlangsungan usaha-usaha mewujudkan Inisiatif Perdamaian Arab, inisiatif Perancis untuk mengadakan konferensi perdamaian internasional, usaha-usaha Quartet saat ini, begitu juga usaha-usaha Mesir dan Federasi Bangsa Rusia;
5. *Memperkuat kebulatan tekadnya* untuk mendukung kelompok-kelompok (bersengketa) melalui negosiasi-negosiasi dan implementasi-implementasi kesepakatan;
6. *Mempertegas* kebulatan tekatnya untuk menentukan langkah-langkah dan sarana-sarana praktis guna mengamankan pelaksanaan penuh dari resolusi-resolusinya yang relevan;
7. *Meminta* Sekretaris Jendral untuk melaporkan kepada Dewan setiap tiga bulan terkait pelaksanaan ketetapan-ketetapan resolusi-resolusi yang sedang berlangsung; *Memutuskan* untuk tetap (konsisten, fokus) dalam kerangka persoalan (United Nations, 2016).

Resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB nomor 2334 pada intinya menuntut Israel segera menghentikan segala kegiatan permukiman dikawasan Palestina. Kawasan yang dimaksud, termasuk Jerrusalem Timur, serta beberapa permukiman yang dinilai tidak memiliki validitas hukum internasional (CNN, 2016). Pendudukan yang dilakukan Israel di kawasan Palestina merupakan penghambat besar bagi perdamaian Israel dan Palestina. DK PBB mengeluarkan resolusi tersebut karena di dasari oleh adanya laporan sejumlah pejabat PBB mengenai percepatan konstruksi yang dilakukan Israel dalam waktu dekat (CNN, 2016). Adapun daftar atau jumlah permukiman Yahudi dikawasan Palestina adalah sebagai berikut :



Gambar 9 Pemukim yang terus meningkat per- tahun dari tahun 1967 hingga 2016

Sumber Gambar : ICBS yang diambil melalui <http://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/population>

Pada gambar grafik diatas terlihat jelas bahwa jumlah permukiman dari tahun 1967 terus meningkat hingga tahun 2016. Hal tersebut menyebabkan kawasan Palestina semakin sempit dan mengundang reaksi masyarakat internasional untuk melakukan perundingan agar aktivitas pembangunan segera dihentikan. Salah satu reaksi internasional tersebut ialah resolusi yang dikeluarkan oleh DK PBB nomor 2334 pada 23 Desember 2016 tepat di akhir masa jabatan Presiden Barack Obama.

Resolusi yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2016 merupakan wujud keseriusan PBB dalam menangani konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Inti dari nresolusi 2334 ialah : “bahwa permukiman Yahudi tidak memiliki dasar hukum yang sah dan berbahaya bagi penerapan solusi dua negara” (CNN, 2016). Adapun tujuan utama dari dikeluarkannya resolusi DK PBB nomor 2334, guna untuk menghentikan aktivitas permukiman yang dilakukan Israel di kawasan Palestina (Aljazeera, 2016). Resolusi 2334 terjadi hasil akhir 14 – 0, yang artinya 14 negara menyetujui resolusi tersebut dan 1 negara abstain terhadap resolusi tersebut. 14 negara yang menyetujui resolusi tersebut adalah, Tiongkok, Perancis, Rusia, Britania raya, Angola, Jepang, Malaysia, Mesir, Selandia Baru, SinegL, Spanyol, Ukraina, Uruguay, dan Venezuela) serta ditambah 1 negara yang memilih abstain yaitu Amerika Serikat.

Sikap Abstain yang diambil Amerika Serikat, akan berdampak serius bagi Israel. Resolusi tersebut menegaskan bahwa Israel harus menghentikan aktivitas kependudukannya dikawasan Palestina. sikap AS yang abstain terhadap resolusi 2334 akan menimbulkan ancaman bagi Israel dalam aktivitas kependudukannya. Sikap abstain yang diberikan Amerika Serikat terhadap Israel membuat Hubungan kedua negara tersebut semakin memburuk di era Barack Obama. Karena, ini merupakan resolusi pertama diloloskan AS terhadap Palestina. Riyad Mansour yang merupakan duta besar Palestina untuk PBB mentarakan bahwa resolusi 2334 merupakan sejarah baru yg telah diputuskan AS setelah 8 tahun bersikap tidak proporsional (CNN, 2016).

Samantha Power yang merupakan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB mengatakan bahwa, AS tidak akan mendukung kembali penambahan lahan permukiman selama masa transisi pemerintahan Barack Obama ke Era Trump. Ia juga mengatakan bahwa aktivitas permukiman dikawasan Palestina tidak begitu diperlukan untuk menjaga keamanan Israel (Times of Israel, 2016). Samantha Power juga menegaskan jika selama ini Amerika Serikat telah mengirimkan pesan baik secara pribadi maupun keluar publik agar wilayah permukiman dikawasan Palestina segera dihentikan (Times of Israel, 2016). Adapun penyampaian pesan tersebut sudah berjalan selama 5 dekade sejak masa kepemimpinan Presiden

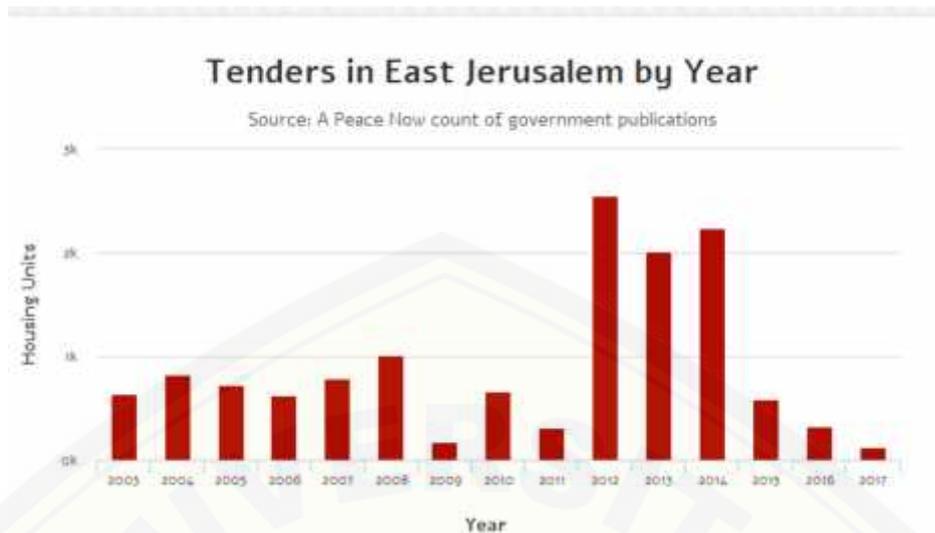
Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George HW Bush, Bill Clinton, George W. Bush, dan Barack Obama (Times of Israel, 2016).



Gambar 10 Duta Besar AS untuk PBB saat berbicara kepada Dewan Keamanan PBB setelah menyatakan sikap Abstain terhadap resolusi 2334.

(Sumber gambar : <https://www.timesofisrael.com/full-text-of-us-envoy-samantha-powers-speech-after-abstention-on-anti-settlement-vote/>)

Samantha Power juga menegaskan bahwa Barack Obama merupakan satu satunya Presiden Amerika Serikat yang serius dalam penanganan konflik Israel dan Palestina dengan cara tidak hanya memiliki satu resolusi Dewan Keamanan terkait kedua negara tersebut. Samantha Power juga memberitahukan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa sikap Abstain yang dinyatakan pada tanggal 23 Desember 2016 lalu merupakan sepenuhnya sikap bipartisan mengenai bagaimana Presiden AS yaitu Barack Obama menanggapi isu konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. bagaimanapun tahun demi tahun, jumlah permukiman yang dilakukan Israel dikawasan Palestina terus meningkat. adapun jumlah orang Israel yang berada di Jerrusalem Timur berjumlah 208.410 Jiwa (PeaceNow, 2017). Pada tahun 2017, pembangunan dikawasan Jerrusalem Timur sejumlah 130 unit rumah (PeaceNoe, 2017). Unit yang dibangun pada tahun 2017 merupakan jumlah terendah sejak pembangunan tahun 2003. Adapun data jelasnya ada pada gambar di bawah ini :



Gambar 11 Jumlah Pembangunan Unit Rumah yang dilakukan Israel di Kawasan Jerrusalem Timur.

Sumber data diambil dari <http://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/jerusalem>

Sikap abstain Amerika Serikat yang diberikan terhadap Resolusi DK PBB nomor 2334 meloloskan resolusi tersebut ke tingkat perundingan internasional. Pada tanggal 1 Februari 2017, sebagian permukiman yang dibangun Israel di kawasan Palestina resmi dihancurkan, permukiman tersbut ialah Amona. Permukiman ilegal Yahudi di kawasan Amona resmi dihancurkan setelah adanya keputusan dari pengadilan internasional yang menyatakan kawasan tersebut dibangun di atas tanah Palestina.

Pada hari kedua tepatnya hari kamis, 2 february 2017 pemerintah Israel menghancurkan permukiman Ilegal yang dibangun di kawasan Palestina tepatnya di tepi Barat Amona (Nytimes, 2017). Kurang lebih 200 orang terpaksa dikeuarkan dari permukiman tersebut karena lolosnya resolusi 2334 (Nytimes, 2017). Kawasan Amona akhirnya dihancurkan setelah bertahun tahun terjadi perdebatan mengenai kependudukan. Kawasan Amona merupakan permukiman terbesar yang terdiri sekitar kurang lebih 100 pos yang dibangun tanpa otorisasi di kawasan Tepi Barat Yerrusalem (Nytimes, 2017). Sebenarnya, pada tahun 2014, Mahkamah Agung telah memberikan keputusan untuk menghancurkan kawasan tersebut karena dibangun di tanah milik Palestina (Nytimes, 2017). Para pemukim

Yahudi dikawasan Amona dipaksa untuk pindah, setelah adanya pertemuan Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump (DW, 2017).

Amerika Serikat menyatakan sikap Abstain terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2334, karena resolusi tersebut terlalu fokus pada permukiman, sedangkan masih banyak faktor lain yang dianggap dapat memicu ketegangan antara Israel dan Palestina dan telah diabaikan. Dibalik keputusan AS yang abstain terhadap Resolusi 2334, Samantha Power juga menyatakan bahwa sikap Abstain tersebut tidak akan merubah komitmen Amerika terhadap keamanan Israel di Timur Tengah. Selain itu Samantha juga menyatakan bahwa semua pihak harus menyadari bahwa Israel menghadapi ancaman yang serius saat ini. Ketakutan orang-orang Israel tentang keberadaan Teroris di lingkungannya juga tidak dapat dianggap remeh karena wilayah yang bersebelahan. Itulah sebabnya, Obama dan pemerintahannya melakukan sikap abstain yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena AS percaya bahwa adanya jaminan terhadap keamanan Israel (Times of Israel, 2016). Akan tetapi keputusan abstain tersebut mendapatkan penolakan di level domestik (nasional) Amerika Serikat.

Pada level domestik Amerika Serikat yaitu Kongres tidak menyetujui adanya keputusan Barack Obama yang mengambil langkah abstain terhadap resolusi 2334. Kongres secara tegas menolak atau mengecam keputusan Barack Obama terhadap Resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB nomor 2334. Sebelumnya kongres meminta Barack Obama untuk memberikan Veto terhadap resolusi 2334 yang digelar pada tanggal 23 Desember 2016. Namun faktanya, Obama justru mengambil langkah yang berbeda yaitu abstain terhadap resolusi nomor 2334. Pengambilan keputusan politik luar negeri Amerika Serikat terkait resolusi 2334 bisa dibilang keputusan baru yang belum pernah diambil sebelumnya dalam sejarah terkait konflik Israel dan Palestina.

Secara tegas, Kongres Amerika Serikat menolak keputusan Barack Obama untuk tidak mem-veto resolusi DK PBB nomor 2334 mengenai aktivitas pendudukan Israel di Palestina. Kongres Amerika Serikat juga membuat sebuah resolusi yang berisi penolakan terhadap resolusi tersebut. Pada H. Res. 11, Kongres AS menentang keputusan PBB terhadap Resolusi Dewan Keamanan

nomor 2334. Kongres AS menyatakan bahwa resolusi tersebut merupakan penghalang bagi Israel dan Palestina untuk mencapai kesepakatan damai (Congress, 2017). Kongres juga menyatakan bahwa keputusan abstain yang diberikan AS terhadap resolusi nomor 2334 tersebut bertentangan dengan persetujuan Oslo serta proses penyelesaian konflik Israel – Palestina secara langsung (Congress, 2017). Perbedaan di level Domestik dan Internasional, membuat penulis tertarik untuk mengambil tema ini sebagai penelitian studi Hubungan Internasional. Oleh sebab itu, adanya keputusan yang berbeda antara Kongres dan Presiden, penulis mencoba menggunakan konsep two Level Game milik Robert Putnam untuk menganalisis.

Perbedaan Sikap yang dinyatakan Amerika Serikat terhadap resolusi DK PBB nomor 2334 di level domestik dan internasionalialah untuk mendapatkan keuntungan kedua pihak. Keberadaan Israel masih dibutuhkan Amerika Serikat untuk menjaga kepentingannya di kawasan Timur Tengah. Maka dengan itu Amerika Serikat tetap mengambil strategi yang pas untuk mendapatkan keuntungan di dua level, baik domestik maupun internasional. Sebelum mengambil langkah abstain terhadap resolusi nomor 2334, Amerika Serikat terlebih dulu memberikan kompensasi yang besar terhadap israel dengan cara pemberian dana bantuan terbesar AS sejumlah 3,8 miliar dollar untuk Israel pada bulan september. Penulis berpendapat bahwa dana tersebut bukan semata mata pemberian As sebagai sekutu Israel. namun dana tersebut merupakan bentuk kompensasi Israel atas keputusan AS terhadap resolusi 2334. Karena melihat jangka waktunya sangat pendek antara pemberian dana bantuan dan keputusan resolusi tersebut. Dana bantuan yang diberikan AS terhadap Israel terjadi di bulan september, sedangkan keputusan tersebut terjadi pada bulan desember.

Strategi yang dimainkan AS terhadap dua level tersebut ialah keputusan kongres yang tidak setuju atas sikap Barack Obama dan sikap abstain di kancah internasional. AS mengambil sikap berbeda terhadap resolusi 2334 dengan cara tidak memveto resolusi tersebut. Hal itu dilakukan AS untuk menjaga hubungan baik antara AS dan Israel di periode berikutnya. Selain itu hal tersebut dikuatkan oleh keputusan AS yang tidak memveto atau menyetujui resolusi 2334.

Sikap Abstain yang diberikaan AS terhadap resolusi tersebut ialah permainan standar ganda yang sudah biasa Amerika Serikat lakukan. level internasional, Amerika Serikat mendapat respon positif dari dunia internasional karena langkahnya yang dianggap tepat bagi kelangsungan perdamaian kedua negara tersebut. Obama berhasil memunculkan citra di akhir jabatannya dengan mengambil langkah Abstain terhadap Resolusi DK PBB nomor 2334. Namun demikian, sikap Abstain yang dikeluarkan Amerika Serikat menimbulkan dampak yang cukup besar. Yaitu lolosnya resolusi tersebut hingga ke mahkamah internasional. Akibatnya, beberapa permukiman yang dibangun Israel di kawasan palestina resmi dihancurkan, salah satunya adalah Amona. Mahkamah Agung telah memerintahkan bahwa Amona harus segera dihancurkan karena dibangun di atas tanah milik pribadi warga Palestina.

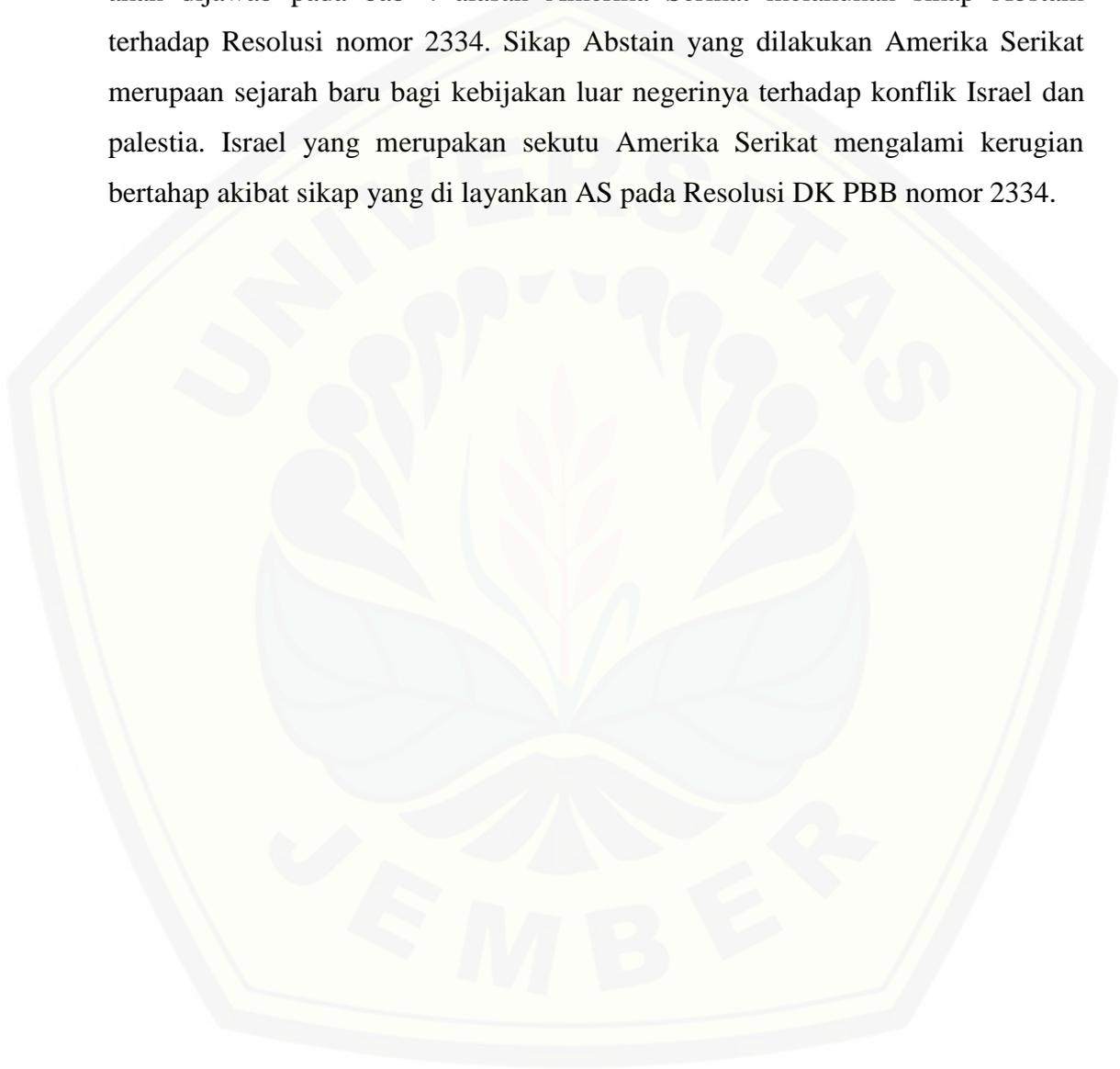


Gambar 12 Proses penghancuran permukiman Amona.

Sumber : <http://www.dw.com/id/kabinet-israel-setujui-pembangunan-permukiman-baru-di-wilayah-palestina/a-38231238>

Permukiman Amona resmi dihancurkan setelah di sahkan resolusi DK PBB nomor 2334. Permukiman tersebut terletak di atas bukit yang berdekatan dengan permukiman Ora. Permukiman Amona ini dibangun dari tahun 1996, dan resmi dihancurkan pada februari 2017 (BBC, 2017). Permukiman ini di hancurkan karena masuk dalam daftar yang masuk dalam milik pribadi warga Palestina.

Pembongkaran yang dilakukan pemerinthan Israel terhadap permukiman Amona merupakan tindakan yang serius dilakukan oleh DK PBB melalui Resolusi nomor 2334. Hal ini juga membuktikan bahwa Amerika Serikat di Era Barack Obama serius dalam menangani konflik Israel dan Palestina. Untuk lebih jelasnya, akan dijawab pada bab 4 alasan Amerika Serikat melakukan sikap Abstain terhadap Resolusi nomor 2334. Sikap Abstain yang dilakukan Amerika Serikat merupakan sejarah baru bagi kebijakan luar negerinya terhadap konflik Israel dan Palestina. Israel yang merupakan sekutu Amerika Serikat mengalami kerugian bertahap akibat sikap yang di layankan AS pada Resolusi DK PBB nomor 2334.



BAB 5 KESIMPULAN

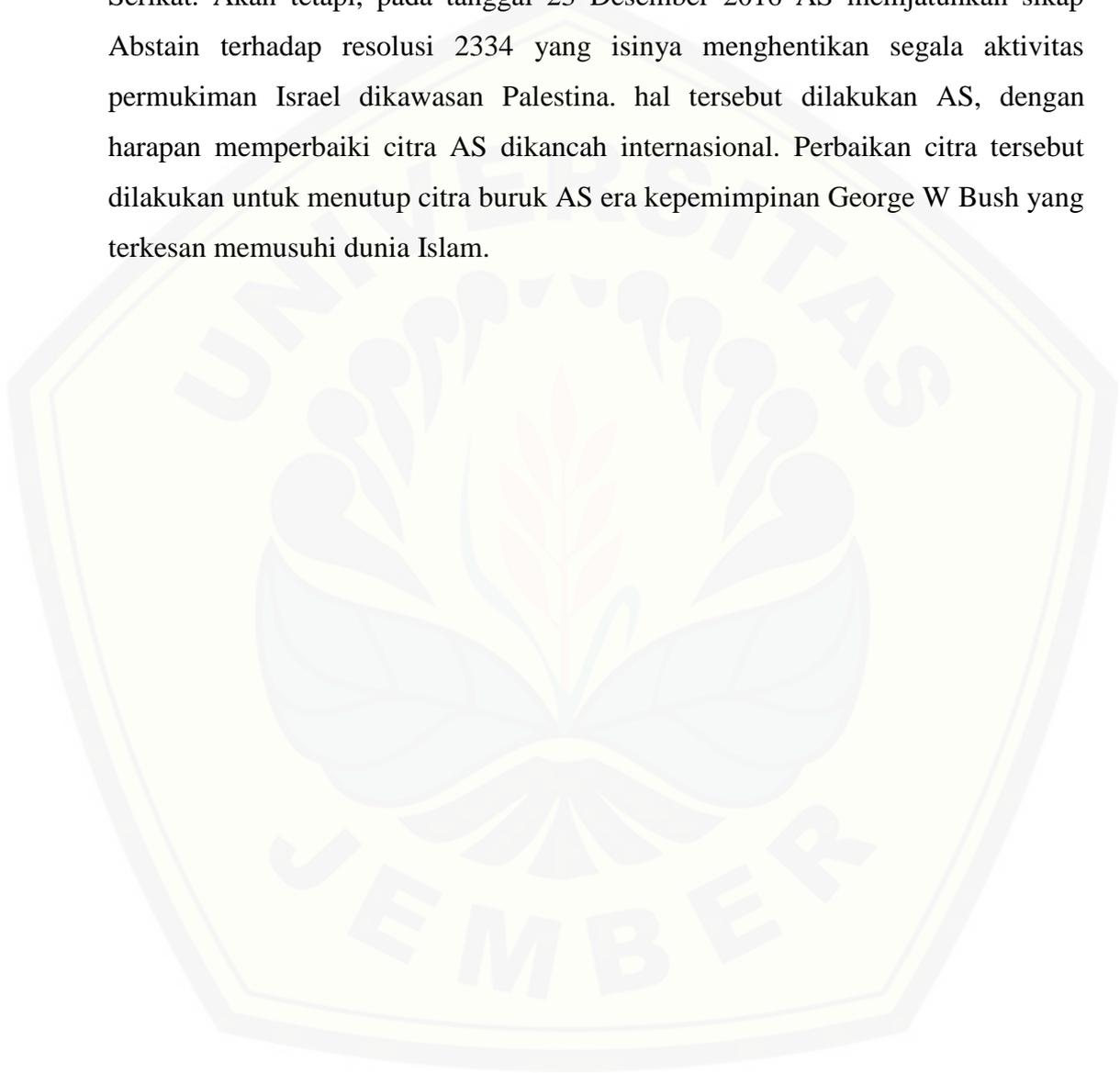
Pada intinya, keputusan abstain yang dilayangkan Amerika Serikat era Presiden Barack Obama terhadap Resolusi DK PBB nomor 2334 pada tanggal 23 Desember 2016 ialah untuk memperbaiki citra AS di kancah internasional. Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Presiden Barack Obama, ingin membuktikan kepada masyarakat internasional bahwa AS juga serius dalam menangani konflik Israel dan Palestina. akan tetapi, penulis melihat bahwa Barack Obama masih ragu-ragu dalam menyelesaikan konflik Israel dan Palestina di akhir kepemimpinannya. Hal tersebut dilihat dari sikapnya terhadap Resolusi DK PBB nomor 2334. Abstain merupakan sikap yang abstrak, tidak menolak dan juga tidak mendukung. Apabila AS serius dalam menangani konflik Israel dan Palestina, seharusnya langkah “menyetujui” jauh lebih baik dibandingkan sikap abstain terhadap resolusi tersebut.

Pada penelitian ini, penulis melihat bahwa dalam melakukan kebijakan luar negerinya, Amerika Serikat selalu menggunakan standar ganda untuk mencapai kepentingannya. Kali ini melalui Resolusi DK PBB nomor 2334, AS berusaha mengambil dua keuntungan di level domestik dan juga internasional. Perbedaan sikap di dua level, baik domestik maupun internasional semakin memperlihatkan komitmen AS dalam melakukan permainan standar gandanya. Pada leel domestik, berada pada Kongres AS, sedangkan di level internasional, Barack Obama bertindak sebagai pembuat keputusan yang diwakilkan oleh Samantha Power.

Sikap kecaman yang dilakukan Kongres terhadap keputusan Obama mengenai abstain di resolusi 2334, merupakan langkah AS untuk tetap mempertahankan komitmennya dalam mendukung Israel sebagai sekutunya. Sedangkan, sikap Amerika Serikat yang mengambil langkah abstain terhadap resolusi 2334 merupakan, momen yang tepat untuk mengembalikan citra AS di akhir kepemimpinan Barack Obama khususnya bagi dunia muslim.

Keputusan Barack Obama yang abstain terhadap resolusi 2334 merupakan strategi yang tepat untuk mendapatkan keuntungan di akhir jabatannya. Sebelumnya Barack Obama pernah memberikan ancaman Veto terhadap resolusi

yang berkaitan dengan konflik Israel dan palestina tahun 2011. Ancaman veto yang diberikan Obama, membuat Palestina gagal mendapatkan pengakuan kemerdekaan serta bergabung dalam anggota PBB pada saat itu. Sehingga, Israel semakin congkak dan berani karena merasa mendapat perlindungan dari Amerika Serikat. Akan tetapi, pada tanggal 23 Desember 2016 AS membatalkan sikap Abstain terhadap resolusi 2334 yang isinya menghentikan segala aktivitas permukiman Israel dikawasan Palestina. hal tersebut dilakukan AS, dengan harapan memperbaiki citra AS dikancah internasional. Perbaikan citra tersebut dilakukan untuk menutup citra buruk AS era kepemimpinan George W Bush yang terkesan memusuhi dunia Islam.



DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Dra.Pertiwi, M. S.i, 2009, *Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta : Tugu Publisier.
- Ishiyama & Breuning. 2013.*Ilmu Politik Jilid 2*.Jakarta.Kencana Prenada Media Gruop
- Krisnadi.2011.*Sejarah Amerika Serikat*.Yogyakarta.Lembah Manah.
- Lexy J, Moleong.1995. *Metodologi penelitian Kualitatif*.Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
- William Coplin & Mercedes Marbun.1992.*Pengantar Politik Internasional*.Bandung.CV, Sinar Baru
- Perwita & Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*.Bandung. PT Renaja Rosdakarya
- K.J. Holsti.1983. *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis*. Jakarta. Erlangga
- Sitepu, Anthonius. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Medan. Graha Ilmu

Jurnal

- Robert Putnam. 1998. *Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Game*, dalam *International Organization*, Vol. 42, No. 3.
- Mearshieomer, John J. 2001. *Tragedy of Great Politics dalam bab Structural Realism*

Internet

- American-Israel Political Action Commite (AIPAC).2016.*Press Release*. Diakses dari <http://www.aipac.org/learn/resources/aipac-publications/publication?pubpath=PolicyPolitics/Press/AIPAC%20Statements/2016/12/AIPAC%20Urges%20Obama%20Administration%20to%20Veto%20Destructive%20UNSC%20Resolution> pada 27 maret 2017

American-Israel Political Action Commite (AIPAC).2017.*House Adopts Resolution Opposing Anti-Israel UNSC Action*.diakses dari <http://www.aipac.org/learn/resources/aipac-publications/publication?pubpath=PolicyPolitics/Press/AIPAC%20Statements/2017/01/House%20Adopts%20Resolution%20Opposing%20Anti%20Israel%20UNSC%20Action> pada 27 maret 2017

American-Israel Political Action Commite (AIPAC).2017.*Our Mission*.diakses dari <http://www.aipac.org/about/mission> pada 20 februari 2017

American-Israel Political Action Commite (AIPAC).2017.*The US & Israel*. Diakses dari <http://www.aipac.org/learn/us-and-israel> pada 19 februari 2017

Andiono Hernawan. 2016. *dukung resolusi PBB Amerika Serikat minta Israel hentikan pendudukan atas palestina*.diakses dari <http://www.lensaindonesia.com/2016/12/29/menteri-luar-negeri-tegaskan-dukung-resolusi-pbb-terkait-konflik-israel-palestina.html> pada tanggal 11 januari 2017

APN.2016.*UN Security Council Resolution 2334*.Diakses dari <https://peacenow.org/entry.php?id=22031> pada tanggal 19 april 2017

Congress.2017. *S.Res.6 - A resolution objecting to United Nations Security Council Resolution 2334 and to all efforts that undermine direct negotiations between Israel and the Palestinians for a secure and peaceful settlement*. diakses dari <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-resolution/6> pada 22 april 2017

Congress.2017.H. *Res.11-Objecting to United Nation Security Council Resolution 2334 as an obstacle to Israeli peace and for other purposes*. Diakses dari <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-resolution/11/text> pada tanggal 22 april 2017

Deutsche Welle.2016. *bantuan militer AS bagi Israel pecahkan rekor*. diakses dari <http://m.dw.com/id/bantuan-militer-as-bagi-israel-pecahkan-rekor/a-19549453> pada 11 januari 2017

Irib Indonesia/MF, 2014, *dukungan finansial dan militer AS kepada Israel*, diakses dari <http://indonesian.trib.ir/editorial/fokus/item/89005-dukungan->

finansial-dan-militer-as-kepada-israel pada tanggal 11 januari 2017

MetroTv.Fajar Nugraha.2016.*PM Israel langsung tolak resolusi DK PBB terkait Permukiman.*
<http://internasional.metrotvnews.com/read/2016/12/24/632841/pm-israel-langsung-tolak-resolusi-dk-pbb-terkait-pemukiman> diakses pada tanggal 22 februari 2017

NPR.2011.*Background:Israel's Pre-1967 Boundaries.*
<http://www.npr.org/2011/05/24/136495202/background-israels-pre-1967-boundaries> diakses pada tanggal 27 februari 2016

The Washington Institute.2016.*Early Implication of the UN Settlement Resolution.* Diakses dari
<http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/early-implications-of-the-un-settlements-resolution> pada tanggal 22 februari 2017

United Nations. SecurityCouncil. 2016. *Resolution 2334.* Diakses dari
<http://www.un.org/webcast/pdfs/SRES2334-2016.pdf> pada tanggal 22 februari 2017

United Nations. SecurityCouncil. 2016. *Resolution 2334.* Diakses dari
<http://www.un.org/webcast/pdfs/SRES2334-2016.pdf> .pada tanggal 22 februari 2017

UVA.2017.*Barack Obama:Life Before The Presidency.* Diakses dari
<https://millercenter.org/president/obama/life-before-the-presidency> pada 7 Februari 2017

You tube.2010.*Kekuatan lobby Israel di USA* diakses dari
<https://www.youtube.com/watch?v=nQ0nONnlq4> pada tanggal 23 april 2017

You tube.2011.*Kekuatan Lobby Israel di USA 1/7.*
<https://www.youtube.com/watch?v=jLGX-tJGOR0> diakses pada tanggal 23 april 2017

- NPR.2011.*Background:Israel's Pre-1967 Boundaries*.
<http://www.npr.org/2011/05/24/136495202/background-israels-pre-1967-boundaries> diakses pada tanggal 27 februari 2016
- The Washington Institute.2016.*Early Implication of the UN Settlement Resolution*. Diakses dari
<http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/early-implications-of-the-un-settlements-resolution> pada tanggal 22 februari 2017
- United Nations. SecurityCouncil. 2016. *Resolution 2334*. Diakses dari
<http://www.un.org/webcast/pdfs/SRES2334-2016.pdf> pada tanggal 22 februari 2017
- United Nations. SecurityCouncil. 2016. *Resolution 2334*. Diakses dari
<http://www.un.org/webcast/pdfs/SRES2334-2016.pdf> .pada tanggal 22 februari 2017
- UVA.2017.*Barack Obama:Life Before The Presidency*. Diakses dari
<https://millercenter.org/president/obama/life-before-the-presidency> pada 7 Februari 2017
- You tube.2010.*Kekuatan lobby Israel di USA* diakses dari
<https://www.youtube.com/watch?v=nQ0nONlnq4> pada tanggal 23 april 2017
- American-Israel Political Action Commite (AIPAC).2017.*Our Mission*.diakses dari <http://www.aipac.org/about/mission> pada 20 februari 2017
- American-Israel Political Action Commite (AIPAC).2017.*The US & Israel*. Diakses dari <http://www.aipac.org/learn/us-and-israel> pada 19 februari 2017
- Andiono Hernawan. 2016. *dukung resolusi PBB Amerika Serikat minta Israel hentikan pendudukan atas palestina*.diakses dari
<http://www.lensaIndonesia.com/2016/12/29/menteri-luar-negeri-tegaskan-dukung-resolusi-pbb-terkait-konflik-israel-palestina.html> pada tanggal 11 januari 2017
- APN.2016.*UN Security Council Resolution 2334*.Diakses dari
<https://peacenow.org/entry.php?id=22031> pada tanggal 19 april 2017

Congress.2017. *S.Res.6 - A resolution objecting to United Nations Security Council Resolution 2334 and to all efforts that undermine direct negotiations between Israel and the Palestinians for a secure and peaceful settlement.* diakses dari <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-resolution/6> pada 22 april 2017

Congress.2017.H. *Res.11-Objecting to United Nation Security Council Resolution 2334 as an obstacle to Israeli peace and for other purposes.* Diakses dari <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-resolution/11/text> pada tanggal 22 april 2017

Deutsche Welle.2016. *bantuan militer AS bagi Israel pecahkan rekor.* diakses dari <http://m.dw.com/id/bantuan-militer-as-bagi-israel-pecahkan-rekor/a-19549453> pada 11 januari 2017

Irib Indonesia/MF, 2014, *dukungan finansial dan militer AS kepada Israel,* diakses dari <http://indonesian.trib.ir/editorial/fokus/item/89005-dukungan-finansial-dan-militer-as-kepada-israel> pada tanggal 11 januari 2017

MetroTv.Fajar Nugraha.2016.*PM Israel langsung tolak resolusi DK PBB terkait Permukiman.* <http://internasional.metrotvnews.com/read/2016/12/24/632841/pm-israel-langsung-tolak-resolusi-dk-pbb-terkait-pemukiman> diakses pada tanggal 22 februari 2017

NPR.2011.*Background:Israel's Pre-1967 Boundaries.* <http://www.npr.org/2011/05/24/136495202/background-israels-pre-1967-boundaries> diakses pada tanggal 27 februari 2016

The Washington Institute.2016.*Early Implication of the UN Settlement Resolution.* Diakses dari <http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/early-implications-of-the-un-settlements-resolution> pada tanggal 22 februari 2017

United Nations. SecurityCouncil. 2016. *Resolution 2334.* Diakses dari <http://www.un.org/webcast/pdfs/SRES2334-2016.pdf> pada tanggal 22 februari 2017

United Nations. SecurityCouncil. 2016. *Resolution 2334.* Diakses dari <http://www.un.org/webcast/pdfs/SRES2334-2016.pdf> .pada tanggal 22 februari 2017

UVA.2017.*Barack Obama:Life Before The Presidency*. Diakses dari <https://millercenter.org/president/obama/life-before-the-presidency> pada 7 Februari 2017

You tube.2010.*Kekuatan lobby Israel di USA* diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=nQ0nONnlq4> pada tanggal 23 april 2017

American-Israel Political Action Commite (AIPAC).2016.*Press Release*. Diakses dari <http://www.aipac.org/learn/resources/aipac-publications/publication?pubpath=PolicyPolitics/Press/AIPAC%20Statements/2016/12/AIPAC%20Urges%20Obama%20Administration%20to%20Veto%20Destructive%20UNSC%20Resolution> pada 27 maret 2017

American-Israel Political Action Commite (AIPAC).2017.*House Adopts Resolution Opposing Anti-Israel UNSC Action*.diakses dari <http://www.aipac.org/learn/resources/aipac-publications/publication?pubpath=PolicyPolitics/Press/AIPAC%20Statements/2017/01/House%20Adopts%20Resolution%20Opposing%20Anti%20Israel%20UNSC%20Action> pada 27 maret 2017

American-Israel Political Action Commite (AIPAC).2017.*Our Mission*.diakses dari <http://www.aipac.org/about/mission> pada 20 februari 2017

American-Israel Political Action Commite (AIPAC).2017.*The US & Israel*. Diakses dari <http://www.aipac.org/learn/us-and-israel> pada 19 februari 2017

Andiono Hernawan. 2016. *dukung resolusi PBB Amerika Serikat minta Israel hentikan pendudukan atas palestina*.diakses dari <http://www.lensaIndonesia.com/2016/12/29/menteri-luar-negeri-tegaskan-dukung-resolusi-pbb-terkait-konflik-israel-palestina.html> pada tanggal 11 januari 2017

APN.2016.*UN Security Council Resolution 2334*.Diakses dari <https://peacenow.org/entry.php?id=22031> pada tanggal 19 april 2017

Congress.2017. *S.Res.6 - A resolution objecting to United Nations Security Council Resolution 2334 and to all efforts that undermine direct negotiations between Israel and the Palestinians for a*

secure and peaceful settlement. diakses dari <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-resolution/6> pada 22 april 2017

Congress.2017.H. *Res.11-Objecting to United Nation Security Council Resolution 2334 as an obstacle to Israeli peace and for other purposes.* Diakses dari <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-resolution/11/text> pada tanggal 22 april 2017

Deutsche Welle.2016. *bantuan militer AS bagi Israel pecahkan rekor.* diakses dari <http://m.dw.com/id/bantuan-militer-as-bagi-israel-pecahkan-rekor/a-19549453> pada 11 januari 2017

Irib Indonesia/MF, 2014, *dukungan finansial dan militer AS kepada Israel,* diakses dari <http://indonesian.tribune.com/indonesian/irib/ir/editorial/fokus/item/89005-dukungan-finansial-dan-militer-as-kepada-israel> pada tanggal 11 januari 2017

MetroTv.Fajar Nugraha.2016.*PM Israel langsung tolak resolusi DK PBB terkait Permukiman.* <http://internasional.metrotvnews.com/read/2016/12/24/632841/pm-israel-langsung-tolak-resolusi-dk-pbb-terkait-pemukiman> diakses pada tanggal 22 februari 2017

NPR.2011.*Background:Israel's Pre-1967 Boundaries.* <http://www.npr.org/2011/05/24/136495202/background-israels-pre-1967-boundaries> diakses pada tanggal 27 februari 2016

The Washington Institute.2016.*Early Implication of the UN Settlement Resolution.* Diakses dari <http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/early-implications-of-the-un-settlements-resolution> pada tanggal 22 februari 2017

United Nations. SecurityCouncil. 2016. *Resolution 2334.* Diakses dari <http://www.un.org/webcast/pdfs/SRES2334-2016.pdf> pada tanggal 22 februari 2017

United Nations. SecurityCouncil. 2016. *Resolution 2334.* Diakses dari <http://www.un.org/webcast/pdfs/SRES2334-2016.pdf> .pada tanggal 22 februari 2017

UVA.2017.*Barack Obama:Life Before The Presidency*. Diakses dari <https://millercenter.org/president/obama/life-before-the-presidency> pada 7 Februari 2017

You tube.2010.*Kekuatan lobby Israel di USA* diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=nQ0nONlnq4> pada tanggal 23 april 2017





LAMPIRAN

United Nations

S/RES/2334 (2016)

**Security Council**Distr.: General
23 December 2016

Resolution 2334 (2016)**Adopted by the Security Council at its 7853rd meeting, on
23 December 2016***The Security Council,**Reaffirming* its relevant resolutions, including resolutions 242 (1967), 338 (1973), 446 (1979), 452 (1979), 465 (1980), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003), and 1850 (2008),*Guided* by the purposes and principles of the Charter of the United Nations, and reaffirming, *inter alia*, the inadmissibility of the acquisition of territory by force,*Reaffirming* the obligation of Israel, the occupying Power, to abide scrupulously by its legal obligations and responsibilities under the Fourth Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, of 12 August 1949, and *recalling* the advisory opinion rendered on 9 July 2004 by the International Court of Justice,*Condemning* all measures aimed at altering the demographic composition, character and status of the Palestinian Territory occupied since 1967, including East Jerusalem, including, *inter alia*, the construction and expansion of settlements, transfer of Israeli settlers, confiscation of land, demolition of homes and displacement of Palestinian civilians, in violation of international humanitarian law and relevant resolutions,*Expressing* grave concern that continuing Israeli settlement activities are dangerously imperilling the viability of the two-State solution based on the 1967 lines,*Recalling* the obligation under the Quartet Roadmap, endorsed by its resolution 1515 (2003), for a freeze by Israel of all settlement activity, including "natural growth", and the dismantlement of all settlement outposts erected since March 2001,*Recalling* also the obligation under the Quartet roadmap for the Palestinian Authority Security Forces to maintain effective operations aimed at confronting all those engaged in terror and dismantling terrorist capabilities, including the confiscation of illegal weapons,

Condemning all acts of violence against civilians, including acts of terror, as well as all acts of provocation, incitement and destruction,

Reiterating its vision of a region where two democratic States, Israel and Palestine, live side by side in peace within secure and recognized borders,

Stressing that the status quo is not sustainable and that significant steps, consistent with the transition contemplated by prior agreements, are urgently needed in order to (i) stabilize the situation and to reverse negative trends on the ground, which are steadily eroding the two-State solution and entrenching a one-State reality, and (ii) to create the conditions for successful final status negotiations and for advancing the two-State solution through those negotiations and on the ground,

1. *Reaffirms* that the establishment by Israel of settlements in the Palestinian territory occupied since 1967, including East Jerusalem, has no legal validity and constitutes a flagrant violation under international law and a major obstacle to the achievement of the two-State solution and a just, lasting and comprehensive peace;

2. *Reiterates* its demand that Israel immediately and completely cease all settlement activities in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem, and that it fully respect all of its legal obligations in this regard;

3. *Underlines* that it will not recognize any changes to the 4 June 1967 lines, including with regard to Jerusalem, other than those agreed by the parties through negotiations;

4. *Stresses* that the cessation of all Israeli settlement activities is essential for salvaging the two-State solution, and calls for affirmative steps to be taken immediately to reverse the negative trends on the ground that are imperilling the two-State solution;

5. *Calls upon* all States, bearing in mind paragraph 1 of this resolution, to distinguish, in their relevant dealings, between the territory of the State of Israel and the territories occupied since 1967;

6. *Calls for* immediate steps to prevent all acts of violence against civilians, including acts of terror, as well as all acts of provocation and destruction, calls for accountability in this regard, and calls for compliance with obligations under international law for the strengthening of ongoing efforts to combat terrorism, including through existing security coordination, and to clearly condemn all acts of terrorism;

7. *Calls upon* both parties to act on the basis of international law, including international humanitarian law, and their previous agreements and obligations, to observe calm and restraint, and to refrain from provocative actions, incitement and inflammatory rhetoric, with the aim, *inter alia*, of de-escalating the situation on the ground, rebuilding trust and confidence, demonstrating through policies and actions a genuine commitment to the two-State solution, and creating the conditions necessary for promoting peace;

8. *Calls upon* all parties to continue, in the interest of the promotion of peace and security, to exert collective efforts to launch credible negotiations on all final status issues in the Middle East peace process and within the time frame specified by the Quartet in its statement of 21 September 2010;

9. *Urges in this regard* the intensification and acceleration of international and regional diplomatic efforts and support aimed at achieving, without delay a comprehensive, just and lasting peace in the Middle East on the basis of the relevant United Nations resolutions, the Madrid terms of reference, including the principle of land for peace, the Arab Peace Initiative and the Quartet Roadmap and an end to the Israeli occupation that began in 1967; and *underscores* in this regard the importance of the ongoing efforts to advance the Arab Peace Initiative, the initiative of France for the convening of an international peace conference, the recent efforts of the Quartet, as well as the efforts of Egypt and the Russian Federation;

10. *Confirms its determination* to support the parties throughout the negotiations and in the implementation of an agreement;

11. *Reaffirms* its determination to examine practical ways and means to secure the full implementation of its relevant resolutions;

12. *Requests* the Secretary-General to report to the Council every three months on the implementation of the provisions of the present resolution;

13. *Decides* to remain seized of the matter.

S.Res.6 - A resolution objecting to United Nations Security Council Resolution 2334 and to all efforts that undermine direct negotiations between Israel and the Palestinians for a secure and peaceful settlement. 115th Congress (2017-2018)

Summary: S.Res.6 — 115th Congress (2017-2018)

Shown Here:

Reported to Senate with amendment(s) (01/12/2017)

Objects to U.N. Security Council Resolution 2334. Such resolution characterizes Israeli settlements in the West Bank and East Jerusalem as illegal and demands cessation of settlement activities.

Calls for such resolution to be repealed or fundamentally altered and allows all final status issues toward a two-state solution to be resolved through direct bilateral negotiations between the parties. Rejects efforts by outside bodies to impose solutions that set back the cause of peace.

Demands that the United States ensure that no action is taken at the Paris Conference on the Israeli-Palestinian conflict scheduled for January 15, 2017, that imposes an agreement or parameters on the parties.

Notes that granting membership and statehood standing to the Palestinians at the UN, its specialized agencies, and other international institutions outside of the context of a bilateral peace agreement with Israel would cause severe harm to the peace process, and would likely trigger penalties under the Department of State, Foreign Operations, and Related Agencies Appropriations Act, 2016 regarding limitations on assistance to the Palestinians.

Rejects any efforts by international organizations to use such resolution to further isolate Israel and urges the U.S. government to act where needed to counter any such efforts.

Urges: (1) the U.S. presidential Administrations to uphold the practice of vetoing all Security Council resolutions that recognize unilateral Palestinian actions or dictate terms and a time line for a solution to the Israeli-Palestinian conflict; and (2) the incoming presidential Administration to work with Congress to create conditions that facilitate the resumption of negotiations without preconditions between Israelis and Palestinians to achieve a sustainable agreement acceptable to both sides.

Reaffirms that it is U.S. policy to seek a sustainable, just, and secure two-state solution to the Israeli-Palestinian conflict.

H.Res.11 - Objecting to United Nations Security Council Resolution 2334 as an obstacle to Israeli-Palestinian peace, and for other purposes.115th Congress (2017-2018)

Text: H.Res.11 — 115th Congress (2017-2018)

Shown Here:

Engrossed in House (01/05/2017)

H. Res. 11

In the House of Representatives, U. S.,

January 5, 2017.

Whereas the United States has long supported a negotiated settlement leading to a sustainable two-state solution with the democratic, Jewish state of Israel and a demilitarized, democratic Palestinian state living side-by-side in peace and security;

Whereas since 1993, the United States has facilitated direct, bilateral negotiations between both parties toward achieving a two-state solution and ending all outstanding claims;

Whereas it is the long-standing policy of the United States that a peaceful resolution to the Israeli-Palestinian conflict will only come through direct, bilateral negotiations between the two parties;

Whereas it is the long-standing position of the United States to oppose and, if necessary, veto United Nations Security Council resolutions dictating additional binding parameters on the peace process;

Whereas it is the long-standing position of the United States to oppose and, if necessary, veto one-sided or anti-Israel resolutions at the United Nations Security Council;

Whereas the United States has stood in the minority internationally over successive Administrations in defending Israel in international forums, including vetoing one-sided resolutions in 2011, 2006, 2004, 2003, 2002, 2001, 1997, and 1995 before the United Nations Security Council;

Whereas the United States recently signed a new Memorandum of Understanding with the Government of Israel regarding security assistance, consistent with longstanding support for Israel among successive Administrations and congresses and representing an important United States commitment toward Israel's qualitative military edge;

Whereas on November 29, 2016, the House of Representatives unanimously passed House Concurrent Resolution 165, expressing the sense of Congress and reaffirming longstanding United States policy in support of a direct bilaterally negotiated settlement of the Israeli-Palestinian conflict and opposition to United Nations Security Council resolutions imposing a solution to the conflict;

Whereas on December 23, 2016, the United States Permanent Representative to the United Nations disregarded House Concurrent Resolution 165 and departed from longstanding United States policy by abstaining and permitting United Nations Security Council Resolution 2334 to be adopted under Chapter VI of the United Nations Charter;

Whereas the United States' abstention on United Nations Security Council Resolution 2334 contradicts the Oslo Accords and its associated process that is predicated on resolving the Israeli-Palestinian conflict between the parties through direct negotiations;

Whereas United Nations Security Council Resolution 2334 claims that "the establishment by Israel of settlements in the Palestinian territory occupied since 1967, including East Jerusalem, has no legal validity and constitutes a flagrant violation under international law and a major obstacle to the achievement of the two-State solution and a just, lasting and comprehensive peace";

Whereas by referring to the “4 June 1967 lines” as the basis for negotiations, United Nations Security Council Resolution 2334 effectively states that the Jewish Quarter of the Old City of Jerusalem and the Western Wall, Judaism’s holiest site, are “occupied territory” thereby equating these sites with outposts in the West Bank that the Israeli government has deemed illegal;

Whereas passage of United Nations Security Council Resolution 2334 effectively lends legitimacy to efforts by the Palestinian Authority to impose its own solution through international organizations and through unjustified boycotts or divestment campaigns against Israel by calling “upon all States, bearing in mind paragraph 1 of this resolution, to distinguish, in their relevant dealings, between the territory of the State of Israel and the territories occupied since 1967”, and will require the United States and Israel to take effective action to counteract the potential harmful impact of United Nations Security Council Resolution 2334;

Whereas UNSCR 2334 did not directly call upon Palestinian leadership to fulfill their obligations toward negotiations or mention that part of the eventual Palestinian state is currently controlled by Hamas, a designated terrorist organization; and

Whereas United Nations Security Council Resolution 2334 both sought to impose or unduly influence solutions to final status issues, and is biased against Israel: Now, therefore, be it

Resolved, That—

(1) it is the sense of the House of Representatives that—

(A) the passage of United Nations Security Council Resolution 2334 undermined the long-standing position of the United States to oppose and veto United Nations Security Council resolutions that seek to impose solutions to final status issues, or are one-sided and anti-Israel, reversing decades of bipartisan agreement;

(B) the passage of United Nations Security Council Resolution 2334 undermines the prospect of Israelis and Palestinians resuming productive, direct negotiations;

(C) the passage of United Nations Security Council Resolution 2334 contributes to the politically motivated acts of boycott, divestment from, and sanctions against Israel and represents a concerted effort to extract concessions from Israel outside of direct negotiations between the Israelis and Palestinians, which must be actively rejected;

(D) any future measures taken in international or outside organizations, including the United Nations Security Council or at the Paris conference on the Israeli-Palestinian conflict scheduled for January 15, 2017, to impose an agreement, or parameters for an agreement including the recognition of a Palestinian state, will set back the cause of peace, harm the security of Israel, run counter to the enduring bipartisan consensus on strengthening the United States-Israel relationship, and weaken support for such organizations;

(E) a durable and sustainable peace agreement between Israel and the Palestinians will come only through direct bilateral negotiations between the parties resulting in a Jewish, democratic state living side-by-side next to a demilitarized Palestinian state in peace and security;

(F) the United States should work to facilitate serious, direct negotiations between the parties without preconditions toward a sustainable peace agreement; and

(G) the United States Government should oppose and veto future United Nations Security Council resolutions that seek to impose solutions to final status issues, or are one-sided and anti-Israel; and

(2) the House of Representatives opposes United Nations Security Council Resolution 2334 and will work to strengthen the United States-Israel relationship, and calls for United Nations Security Council Resolution 2334 to be repealed or fundamentally altered so that—

(A) it is no longer one-sided and anti-Israel; and

(B) it allows all final status issues toward a two-state solution to be resolved through direct bilateral negotiations between the parties.

Attest:

Full text of US envoy Samantha Power's speech after abstention on anti-settlement vote

'Settlement problem is putting at risk viability of two-state solution,' ambassador tells Security Council. 'Our vote does not diminish US commitment to security of Israel'

By [TOI STAFF](#) 24 December 2016, 12:00 am

Full text of US Ambassador to the UN Samantha Power's speech, explaining the US abstention on Resolution 2334, which calls for a halt to all Israeli settlement activity in the West Bank and East Jerusalem, December 23, 2016.

Thank you, Mr. President.

Let me begin with a quote: "The United States will not support the use of any additional land for the purpose of settlements during the transitional period. Indeed, the immediate adoption of a settlement freeze by Israel, more than any other action, could create the confidence needed for wider participation in these talks. Further settlement activity is in no way necessary for the security of Israel and only diminishes the confidence of the Arabs that a final outcome can be freely and fairly negotiated."

This was said in 1982 by President Ronald Reagan. He was speaking about a new proposal that he was launching to end the Israeli-Palestinian

conflict. While ultimately, of course, President Reagan's proposal was not realized, his words are still illuminating in at least two respects.

First, because they underscore the United States' deep and long-standing commitment to achieving a comprehensive and lasting peace between the Israelis and Palestinians. That has been the policy of every administration, Republican and Democrat, since before President Reagan and all the way through to the present day.

Second, because President Reagan's words highlight the United States' long-standing position that Israeli settlement activity in territories occupied in 1967 undermines Israel's security, harms the viability of a negotiated two-state outcome, and erodes prospects for peace and stability in the region. Today, the Security Council reaffirmed its established consensus that settlements have no legal validity. The United States has been sending the message that the settlements must stop – privately and publicly – for nearly five decades, through the administrations of Presidents Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, and now Barack Obama. Indeed, since 1967, the only president who had not had at least one Israeli-Palestinian-related Security Council resolution pass during his tenure is Barack Obama. So our vote today is fully in line with the bipartisan history of how American Presidents have approached both the issue – and the role of this body.

Given the consistency of this position across U.S. administrations, one would think that it would be a routine vote for the U.S. to allow the passage of a resolution with the elements in this one, reaffirming the long-standing U.S. position on settlements, condemning violence and incitement, and calling for the parties to start taking constructive steps to

reverse current trends on the ground. These are familiar, well-articulated components of U.S. policy.

But in reality this vote for us was not straightforward, because of where it is taking place – at the United Nations. For the simple truth is that for as long as Israel has been a member of this institution, Israel has been treated differently from other nations at the United Nations. And not only in decades past – such as in the infamous resolution that the General Assembly adopted in 1975, with the support of the majority of Member States, officially determining that, “Zionism is a form of racism” – but also in 2016, this year. One need only look at the 18 resolutions against Israel adopted during the UN General Assembly in September; or the 12 Israel-specific resolutions adopted this year in the Human Rights Council – more than those focused on Syria, North Korea, Iran, and South Sudan put together – to see that in 2016 Israel continues to be treated differently from other Member States.

Like U.S. administrations before it, the Obama Administration has worked tirelessly to fight for Israel’s right simply to be treated just like any other country – from advocating for Israel to finally be granted membership to a UN regional body, something no other UN Member State had been denied; to fighting to ensure that Israeli NGOs are not denied UN accreditation, simply because they are Israeli, to getting Yom Kippur finally recognized as a UN holiday; to pressing this Council to break its indefensible silence in response to terrorist attacks on Israelis. As the United States has said repeatedly, such unequal treatment not only hurts Israel, it undermines the legitimacy of the United Nations itself.

The practice of treating Israel differently at the UN matters for votes like this one. For even if one believes that the resolution proposed today is justified – or, even more, necessitated – by events on the ground, one cannot completely separate the vote from the venue.

And Member States that say they are for the two-state solution must ask themselves some difficult questions. For those states that are quick to promote resolutions condemning Israel, but refuse to recognize when innocent Israelis are the victims of terrorism – what steps will you take to stop treating Israel differently? For those states that passionately denounce the closures of crossings in Gaza as exacerbating the humanitarian situation, but saying nothing of the resources diverted from helping Gaza’s residents to dig tunnels into Israeli territory so that terrorists can attack Israelis in their homes – what will you do to end the double-standard that undermines the legitimacy of this institution?

Member States should also ask themselves about the double standards when it comes to this Council taking action. Just this morning we came together, as a Council, and we were unable to muster the will to act to stop the flow of weapons going to killers in South Sudan, who are perpetrating mass atrocities that the UN has said could lead to genocide. We couldn’t come together just to stem the flow of arms. Earlier this month, this Council could not muster the will to adopt the simplest of resolutions calling for a seven-day pause in the savage bombardment of innocent civilians, hospitals, and schools in Aleppo. Yet when a resolution on Israel comes before this Council, members suddenly summon the will to act.

It is because this forum too often continues to be biased against Israel; because there are important issues that are not sufficiently addressed in this resolution; and because the United States does not agree with every word in this text, that the United States did not vote in favor of the resolution. But it is because this resolution reflects the facts on the ground – and is consistent with U.S. policy across Republican and Democratic administration throughout the history of the State of Israel – that the United States did not veto it.

The United States has consistently said we would block any resolution that we thought would undermine Israel's security or seek to impose a resolution to the conflict. We would not have let this resolution pass had it not also addressed counterproductive actions by the Palestinians such as terrorism and incitement to violence, which we've repeatedly condemned and repeatedly raised with the Palestinian leadership, and which, of course, must be stopped.

Unlike some on the UN Security Council, we do not believe that outside parties can impose a solution that has not been negotiated by the two parties. Nor can we unilaterally recognize a future Palestinian state. But it is precisely our commitment to Israel's security that makes the United States believe that we cannot stand in the way of this resolution as we seek to preserve a chance of attaining our long-standing objective: two states living side-by-side in peace and security. Let me briefly explain why.

The settlement problem has gotten so much worse that it is now putting at risk the very viability of that two-state solution. The number of settlers in the roughly 150 authorized Israeli settlements east of the 1967 lines has increased dramatically. Since the 1993 signing of the Oslo Accords – which launched efforts that made a comprehensive and lasting peace possible – the number of settlers has increased by 355,000. The total settler population in the West Bank and East Jerusalem now exceeds 590,000. Nearly 90,000 settlers are living east of the separation barrier that was created by Israel itself. And just since July 2016 – when the Middle East Quartet issued a report highlighting international concern about a systematic process of land seizures, settlement expansions, and legalizations – Israel has advanced plans for more than 2,600 new settlement units. Yet rather than dismantling these and other settler outposts, which are illegal even under Israeli law, now there is new legislation advancing in the Israeli Knesset that would legalize most of

the outposts – a factor that propelled the decision by this resolution’s sponsors to bring it before the Council.

One cannot simultaneously champion expanding Israeli settlements and champion a viable two-state solution that would end the conflict. One has to make a choice between settlements and separation

The Israeli Prime Minister recently described his government as “more committed to settlements than any in Israel’s history,” and one of his leading coalition partners recently declared that “the era of the two-state solution is over.” At the same time, the Prime Minister has said that he is still committed to pursuing a two-state solution. But these statements are irreconcilable. One cannot simultaneously champion expanding Israeli settlements and champion a viable two-state solution that would end the conflict. One has to make a choice between settlements and separation.

In 2011, the United States vetoed a resolution that focused exclusively on settlements, as if settlements were they only factor harming the prospects of a two-state solution. The circumstances have changed dramatically. Since 2011, settlement growth has only accelerated. Since 2011, multiple efforts to pursue peace through negotiations have failed. And since 2011, President Obama and Secretary Kerry have repeatedly warned – publically and privately – that the absence of progress toward peace and continued settlement expansion was going to put the two-state solution at risk, and threaten Israel’s stated objective to remain both a Jewish State and a democracy. Moreover, unlike in 2011, this resolution condemns violence, terrorism and incitement, which also poses an extremely grave risk to the two-state solution. This resolution reflects trends that will permanently destroy the hope of a two-state solution if they continue on their current course.

The United States has not taken the step of voting in support of this resolution because the resolution is too narrowly focused on settlements, when we all know – or we all should know – that many other factors contribute significantly to the tensions that perpetuate this conflict. Let us be clear: even if every single settlement were to be dismantled tomorrow, peace still would not be attainable without both sides acknowledging uncomfortable truths and making difficult choices. That is an indisputable fact. Yet it is one that is too often overlooked by members of the United Nations and by members of this Council.

For Palestinian leaders, that means recognizing the obvious: that in addition to taking innocent lives – the incitement to violence, the glorification of terrorists, and the growth of violent extremism erodes prospects for peace, as this resolution makes crystal clear. The most recent wave of Palestinian violence has seen terrorists commit hundreds of attacks – including driving cars into crowds of innocent civilians and stabbing mothers in front of their children. Yet rather than condemn these attacks, Hamas, other radical factions, and even certain members of Fatah have held up the terrorists as heroes, and used social media to incite others to follow in their murderous footsteps. And while President Abbas and his party's leaders have made clear their opposition to violence, terrorism, and extremism, they have too often failed to condemn specific attacks or condemn the praised heaped upon the perpetrators.

President Obama and this administration have shown an unprecedented commitment to Israel's security because that is what we believe in

Our vote today does not in any way diminish the United States' steadfast and unparalleled commitment to the security of Israel, the only democracy in the Middle East. We would not have let this resolution pass had it not also addressed counterproductive actions by Palestinians.

We have to recognize that Israel faces very serious threats in a very tough neighborhood. Israelis are rightfully concerned about making sure there is not a new terrorist haven next door. President Obama and this administration have shown an unprecedented commitment to Israel's security because that is what we believe in.

Our commitment to that security has never wavered, and it never will. Even with a financial crisis and budget deficits, we've repeatedly increased funding to support Israel's military. And in September, the Obama administration signed a Memorandum of Understanding to provide \$38 billion in security assistance to Israel over the next 10 years – the largest single pledge of military assistance in U.S. history to any country. And as the Israeli Prime Minister himself has noted, our military and intelligence cooperation is unprecedented. We believe, though, that continued settlement building seriously undermines Israel's security.

Some may cast the U.S. vote as a sign that we have finally given up on a two-state solution. Nothing could be further from the truth. None of us can give up on a two-state solution. We continue to believe that that solution is the only viable path to provide peace and security for the state of Israel, and freedom and dignity for the Palestinian people. And we continue to believe that the parties can still pursue this path, if both sides are honest about the choices, and have the courage to take steps that will be politically difficult. While we can encourage them, it is ultimately up to the parties to choose this path, as it always has been. We sincerely hope that they will begin making these choices before it is too late.